



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED



STASIUN PSDKP AMBON

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun PSDKP Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 30 Januari 2023
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Ambon



Mubarak, S. St.Pi
NIP. 19830629 200701 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

Jln. Ir. M. Putuhena, Wailela – Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, 97234.
Tlp. (0911) 351783, Fax. (0911) 351781

Laman : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon - Email : psdkp.ambon@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 30 Januari 2023

**Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Ambon,**



Mubarak, S. St.Pi

NIP. 19830629 200701 1 001

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Ambon Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.456.855,00. Sedangkan pada Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.929.273.964,00 atau mencapai 99.78% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.969.066.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp28.063.095.716,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp416.859.901,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp27.646.235.815,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban jangka pendek Rp25.728.553,00 dan Ekuitas sebesar Rp28.037.367.163,00. Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp28.063.095.716,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional kegiatan, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.996.986,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20.444.828.217,00.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp459.869,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp459.869,00. Dan defisit pos-pos luar biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(20.449.513.034,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp30.473.742.327,00. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(20.449.513.034,00). kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.011.034.909,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp28.037.367.163,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	17.857.000,00	11.456.855,00	64
Hibah		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		17.857.000,00	11.456.855,00	64
BELANJA NEGARA	B.2			
BELANJA TRANSAKSI				
Belanja Pegawai	B.3	5.479.550.000,00	5.469.651.889,00	99.82
Belanja Barang	B.4	11.872.220.000,00	11.842.363.631,00	99.75
Belanja Modal	B.5	617.296.000,00	617.258.444,00	99.99
JUMLAH BELANJA NEGARA		17.969.066.000,00	17.929.273.964,00	99.78

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) %
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar di Muka	C.4	25.333.333,00	61.458.333,00	(58,78)
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	0,00	0,00	0,00
Persediaan	C.6	391.526.568,00	105.982.400,00	269,43
Jumlah Aset Lancar		416.859.901,00	167.440.733,00	148,96
ASET TETAP				
Tanah	C.7	6.248.730.383,00	6.248.730.383,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.8	43.865.409.651,00	43.356.586.207,00	1,17
Gedung dan Bangunan	C.9	7.288.390.955,00	7.288.390.955,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	498.761.400,00	512.761.400,0000	(2,73)
Aset Tetap Lainnya	C.11	0,00	7.975.000,00	(100,00)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	C.12	239.903.713,00	239.903.713,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(30.494.960.287,00)	(27.337.131.383,00)	11,55
Jumlah Aset Tetap		27.646.235.815,00	30.317.216.275,00	(8,81)
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	C.14	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C.15	85.120.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(85.120.000,00)	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET		28.063.095.716,00	30.484.657.008,00	(7,94)

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.17	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	25.728.553,00	10.914.681,00	135,72
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.728.553,00,00	10.914.681,00	135,72
JUMLAH KEWAJIBAN		25.728.553,00,00	10.914.681,00	135,72
EKUITAS				
Ekuitas	C.20	28.037.367.163,00	30.473.742.327,00	(7,99)
JUMLAH EKUITAS		28.037.367.163,00	30.473.742.327,00	(7,99)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28.063.095.716,00	30.484.657.008,00	(7,94)

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) %
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	10.996.986,00	1.535.000,00	616,416
JUMLAH PENDAPATAN		10.996.986,00	1.535.000,00	616,416
BEBAN				
Beban Pegawai	D.2	5.483.955.889,00	4.584.586.989,00	19,617
Beban Persediaan	D.3	131.195.080,00	149.437.100,00	(12,207)
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.188.735.525,00	6.756.771.134,00	21,193
Beban Pemeliharaan	D.5	1.873.396.979,00	1.434.819.295,00	30,567
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.496.336.551,00	1.413.988.453,00	5,824
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0,00	0,00	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.271.208.193,00	3.939.982.960,00	(16,974)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,00	0,00	-
JUMLAH BEBAN		20.444.828.217,00	18.279.585.931,00	11,845
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.433.831.231,00)	(18.278.050.931,00)	11,794
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0,00	20.486.600,00	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		16.141.672,00	1.631.719.826,00	(99,011)
Surplus/(defisit) Selisih Pelepasan Aset Non Lancar		(16.141.672,00)	(1.611.233.226,00)	(98,998)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		459.869,00	8.932.084,00	(94,851)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		459.869,00	8.932.084,00	(94,851)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NOPERASIONAL		(15.681.803,00)	(1.602.301.142,00)	(99,021)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(20.449.513.034,00)	(19.880.352.073,00)	2,863
POS LUAR BIASA				
Beban luar biasa	D.12	0,00	0,00	-
Surplus (Defisit) dari pos luar biasa		0,00	0,00	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(20.449.513.034,00)	(19.880.352.073,00)	2,863

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	30.473.742.327,00	29.869.932.568,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(20.449.513.034,00)	(19.880.352.073,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	2.102.961,00	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	2.102.961,00	0,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	18.011.034.909,00	20.484.161.832,00
EKUITAS AKHIR	E.5	(2.436.375.164,00)	603.809.759,00
		28.037.367.163,00	30.473.742.327,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

Dasar Hukum Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Entitas dan Rencana Strategis Ambon merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 714 dan 715. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di

emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Ambon berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

Stasiun PSDKP Ambon memiliki Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang dan Pegawai honor PPNPN sebanyak 32 orang. Stasiun PSDKP Ambon di pimpin oleh

Kepala Stasiun dengan level setara eselon 4 dan dibantu oleh 1 (satu) eselon 5 yaitu Kepala Urusan Umum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi. Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan T.A. 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutase persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO
 - dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan

dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

h. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Ambon telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pagu awal sebesar Rp20.539.539.000 sampai dengan revisi akhir menjadi sebesar Rp 17,969,066,000. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan/penghapusan langsung anggaran *Automatic Adjustment* sekaligus menyesuaikan dengan target volume output dan melakukan pergeseran anggaran antar satker. Berikut daftar rincian DIPA, sebagai berikut :

Daftar rincian DIPA

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara		
Pendapatam Perpajakan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,539,539,000	17,969,066,000
Jumlah Pendapatan	20,539,539,000	17,969,066,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,979,396,000	5,479,550,000
Belanja Barang	14,215,443,000	11,872,220,000
Belanja Modal	1,344,700,000	617,296,000
Jumlah Belanja	20,539,539,000	17,969,066,000

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2022, Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut :

- **Revisi DIPA ke 01** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3739-0109-5408-0027 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 01 merupakan revisi kewenangan DJA. Digital Stamp mengalami perubahan, karena revisi 1 merupakan revisi *Refocusing* (pemblokiran) sebesar Rp900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp77.000.000,00
 - ✓ 2350.RCG.OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp101.753.000,00
 - ✓ 2352.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp6.600.000,00
 - ✓ 2352.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp223.847.000,00

- ✓ 2353.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp19.500.000,00
 - ✓ 2353.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp150.500.000,00
 - ✓ 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp90.000.000,00
 - ✓ 2355.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp55.000.000,00
 - ✓ 2355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp175.800.000,00
- **Revisi DIPA ke 02** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 11 April 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3739-0109-5408-0027 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00.
Revisi 02 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi 2 merupakan revisi pemanfaatan dan perubahan Halaman III DIPA. Adapun usulan pemanfaatan dan perubahan tersebut antara lain:
 - ✓ Penggabungan dan perubahan detail Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Pelaksanaan Perkara Sanksi Administratif yaitu Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif Stasiun/Satwas/Wilker SDKP (Rp6.000.000,00) dan Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi Administratif ke pusat (Rp16.000.000,00) menjadi Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif Stasiun/Satwas/Wilker SDKP (Rp22.000.000,00)
 - ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp3.500.000,00 ke Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi pada Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp900.000,00 dan Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.600.000,00.
 - ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Konsolidasi Data dan Pelaporan

Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan ke Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Pelaksanaan Pemeriksaan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan sebesar Rp3.525.000,00.

- ✓ Pergeseran anggaran Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi dari Akun 521211 Belanja Bahan ke Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.000.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota – Pemeriksaan pelaku usaha kapal perikanan antara lain Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha Bidang Perikanan Tangkap (dari anggaran Rp30.000.000,00 menjadi Rp23.100.000,00, Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Pengawasan Ikan Hasil Tangkapan (Cirebon) (dari anggaran Rp19.000.000,00 menjadi Rp18.300.000,00) dan Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan (Rp7.600.000,00)
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota – Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan antara lain Perjalanan Dinas Bimtek Identifikasi Taksonomi Ikan (Yogyakarta) (dari anggaran Rp18.000.000,00 menjadi Rp22.710.000,00) dan Perjalanan Dinas Bimtek Tata Cara Pengawasan Berusaha Subsektor Pembudidayaan Ikan (Sulawesi Selatan) (dari anggaran Rp12.000.000,00 menjadi Rp7.290.000,00)
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya – Pengadaan Seragam antara lain Pakaian Dinas Harian PSDKP PNS (dari anggaran Rp44.200.000,00 menjadi Rp39.950.000,00), Emblem Kabaret (Rp2.550.000,00) dan Kabaret (Rp1.700.000,00)
- ✓ Pergeseran anggaran Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19 dari Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 ke Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp16.800.000,00.

- ✓ Pergeseran anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari Pemeliharaan Kantor (Rp4.800.000,00) dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Rp7.440.000,00) ke Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Rp9.240.000,00) dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Rp3.000.000,00)
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran antara lain AC 2 PK (Rp15.900.000,00), AC ½ PK (Rp440.000,00), Kursi Kerja Satwas (Rp3.660.000,00), Meja Kerja Satwas (Rp7.320.000,00), Meja Kerja UPT (Rp20.200.000,00), Podium (Rp2.350.000,00), Lemari Pakaian (Rp15.540.000,00), Tempat Tidur (Rp21.700.000,00), Mesin Pembuat Kopi (Rp10.560.000,00), Kursi Kerja UPT (Rp7.650.000,00), Lemari Arsip (Rp10.200.000,00) dan Speaker (Rp5.480.000,00)
- ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai ke Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Administrasi Mutasi Pegawai sebesar Rp20.000.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional pada Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa antara lain Perjalanan Dinas Uji Kompetensi JFT Pengawas Perikanan (dari anggaran Rp16.000.000,00 menjadi Rp7.000.000,00) dan Perjalanan Dinas Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Rp8.500.000,00), serta pergeseran ke Akun 521211 Belanja Bahan antara lain Perlengkapan Uji Kompetensi JFT Pengawas Perikanan sebesar Rp500.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 521211 Belanja Bahan – Penyusunan Laporan Kegiatan antara lain Penggandaan dan Penjilidan Laporan Tahunan (dari anggaran Rp50.000,00 menjadi Rp200.000,00), Penggandaan dan Penjilidan Laporan Bulanan (dari anggaran Rp2.400.000,00 menjadi Rp1.500.000,00), Penggandaan dan Penjilidan Laporan LKJ Triwulanan (dari anggaran Rp200.000,00 menjadi Rp800.000,00),

dan Penggandaan dan Penjilidan Laporan LKJ Tahunan (dari anggaran Rp50.000,00 menjadi Rp200.000,00).

- **Revisi DIPA ke 03** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 06 September 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 4826-0272-7467-4080 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 03 merupakan revisi kewenangan DJA. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.

Revisi ke 03 merupakan Revisi *Refocusing* (pemblokiran) sebesar Rp2.138.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ 2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp647.821.000,00;
 - ✓ 2350.RCG. OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp940.151.000,00;
 - ✓ 2351.BCE. Penanganan Perkara sebesar Rp161.721.000,00;
 - ✓ 2352.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp37.947.000,00;
 - ✓ 2353.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp58.275.000,00;
 - ✓ 2353.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp189.585.000,00;
 - ✓ 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp43.050.000,00;
 - ✓ 2355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp59.450.000,00.
- Adapun pergeseran anggaran antara lain :
- ✓ Dari Akun 521211 Belanja Bahan (Air Bersih) – Dukungan Logistik Kapal Pengawas ke Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13) – Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp1.280.000,00;
 - ✓ Pada Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas, dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Rangka Perjalanan Dinas Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP) ke Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13) sebesar Rp12.000.000,00.
- **Revisi DIPA ke 04** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Juli 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 5527-7098-3787-9637

dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 04 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.

Revisi ke 04 merupakan usulan revisi anggaran dalam rangka revisi halaman III DIPA dan revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya, menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi serta pergeseran anggaran dalam KRO yang sama, serta revisi antar belanja, yaitu dari belanja 52 ke belanja 53.

Revisi antar belanja pada KRO 2350 RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Revisi ini dimaksudkan untuk memenuhi belanja modal belanja pemasangan peralatan dan mesin sebesar Rp2.992.000 yang diambil dari belanja 52 dalam KRO yang sama.

- **Revisi DIPA ke 05** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3407-6011-0025-4365 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi ke 05 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QHD.001.052.A. Dukungan Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp. 51.969.000,- dan 2350.QHD.001.052.C. Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 19.458.000,- ke 2350.QHD.001.052.E. Penyegaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan sebesar Rp. 15.483.000,- dan 2350.QHD.001.052.F. Pengadaan Seragam Awak Kapal Pengawas sebesar Rp 55.584.000;
- ✓ Dari 2350.QHD.003.051. Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas ke 2350.QHD.003.052. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas sebesar Rp. 264.000,- serta 2350.QHD.003.052.B. Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar) sebesar Rp. 1.937.000,- ke 2350.QHD.003.052.A. Operasional Speed Boat 8 Meter sebesar Rp. 2.201.000;
- ✓ Dari 2350.RCG.001.052.A. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas sebesar Rp. 19.656.000,-, 2350.RCG.001.052.B. Perawatan Prediktif Kapal Pengawas sebesar Rp. 6.375.000,-, 2350.RCG.001.052.D. Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat sebesar Rp.

- 7.956.000,-, 2350.RCG.001.052.E. Perawatan Prediktif Speed Boat Pengawas sebesar Rp. 20.227.000,- dan 2350.RCG.001.052.F. Perawatan Darurat Speed Boat Pengawas sebesar Rp. 29.000.000,- ke 2350.RCG.001.052.C. Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp. 83.214.000;
- ✓ Dari 2355.EBC.956. Layanan BMN sebesar Rp. 1.300.000,- dan 2355.EBA.994. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 360.000,- ke 2355.EBA.962. Layanan Umum sebesar Rp. 1.660.000;
 - ✓ Dari 2355.EBA.994.001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 4.300.000,-, 2355.EBA.994.001.A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNSsebesar Rp. 3.400.000,-, 2355.EBA.994.001.A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS sebesar Rp. 2.700.000 ke 2355.EBA.994.001.A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp. 100.000,-, 2355.EBA.994.001.A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp. 800.000,-, 2355.EBA.994.001.A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS sebesar Rp. 3.000.000,- dan 2355.EBA.994.001.A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp. 6.500.000;
 - ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 30.850.000,- ke 2355.EBA.994.002.A. Keperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp. 890.000,- 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 500.000,- dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 29.100.000;
 - ✓ Dari 2355.EBC.954.053.B. Administrasi Mutasi Pegawai sebesar Rp. 1.736.000,- dan 2355.EBC.954.053.C. Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 16.000.000,- ke 2355.EBC.954.053.A. Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai sebesar Rp. 17.736.000;
 - ✓ Dari 2355.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 790.000,-, 2355.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 2.362.000,- dan 2355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp.

1.487.000,- ke 2355.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 4.639.000

- **Revisi DIPA ke 06** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 0124-8068-1170-3068 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.074.104.000,00. Revisi ke 06 merupakan revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Terdapat kekurangan belanja pegawai senilai Rp549.565.000 yang diperuntukkan guna pembayaran THR dan Gaji Ke-13. Selain itu, Stasiun PSDKP Ambon mendapatkan tambahan 2 CPNS pada tahun 2022, sehingga anggaran belanja pegawai Stasiun PSDKP Ambon belum tercukupi sampai dengan akhir tahun 2022;
- ✓ Belum tercukupinya anggaran perawatan darurat Kapal Pengawas Hiu 13. Kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas Hiu 13 sebesar Rp84.000.000 dikarenakan Permintaan Gubernur dan Soket Gubernur Genset Kanan dan Genset Kiri serta Kerusakan Display Genset Kanan pada KP. Hiu 13. Pemenuhan kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas berasal dari pergeseran antar KRO PN yaitu dari KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam ke 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan dalam RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat. Adapun pergeseran ini tidak mengubah volume output;
- ✓ Pergeseran anggaran belanja modal pada KRO 2355.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ke KRO 2355.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp3.312.000,-. Adapun pergeseran dimaksud untuk memenuhi belanja lensa kamera dalam rangka mendukung kegiatan Kehumasan Stasiun PSDKP Ambon. Pergeseran anggaran menyebabkan perubahan volume dari 22 unit menjadi 23 unit;
- ✓ Pergeseran antar KRO dan RO dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Penambahan anggaran pada RO 2355.EBA.962 Layanan Umum sebesar Rp45.600.000,-, dimaksudkan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas undangan/koordinasi yang mana sampai dengan akhir tahun belum tercukupi. Selain itu, penambahan anggaran untuk pengadaan seragam Pakaian Olahraga untuk seluruh pegawai Stasiun PSDKP Ambon.
 2. Penambahan anggaran pada RO 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp14.508.000, untuk memenuhi belanja perjalanan dinas Rekonsiliasi SAIBA Tahunan
- **Revisi DIPA ke 07** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 16 November 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 0124-8068-1170-3068 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 21.074.104.000,00. Revisi ke 07 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :
 - ✓ Dari 2350.QHD.001.052.A. Dukungan Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp. 4.105.000 dan 2350.QHD.001.052.E. Penyegaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan sebesar Rp. 6.335.000 ke 2350.QHD.001.052.F. Pengadaan Seragam Awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 10.440.000;
 - ✓ Dari 2350.QHD.003.052.A. Operasional Speed Boat 8 Meter sebesar Rp. 7.900.000 dan 2350.QHD.003.052.B. Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar) sebesar Rp. 5.872.000 ke 2350.QHD.003.052.C. Pengadaan Seragam Operator Speedboat Pengawas sebesar Rp. 13.772.000;
 - ✓ Dari 2352.QIC.001.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 5.790.000 dan 2352.QIC.001.053.A Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha sebesar Rp. 5.500.000 ke 2352.QIC.001.052.A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 11.290.000;
 - ✓ Dari 2353.QIC.001.052.B. Tindak lanjut hasil pengawasan pelaku usaha kapal perikanan sebesar Rp.

- 6.500.000 ke 2353.QIC.001.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha kapal perikanan sebesar Rp. 6.500.000;
- ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan komoditas tertentu (LKR) ke detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Satwas Seram Bagian Timur sebesar Rp. 3.340.000;
 - ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 5.400.000 ke 2355.EBA.994.002.A Keperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp. 5.520.000, 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 111.000 dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 9.000;
 - ✓ Dari 2355.EBC.954.053.A.524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ke 2355.EBC.954.053.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 8.943.000.
- **Revisi DIPA ke 08** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 02 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 08 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.
Menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-958/MK.02/2022 perihal Realokasi Anggaran K/L TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pemenuhan Belanja Gaji (Cilacap dan Batam) dan permohonan untuk melakukan pemotongan/penghapusan langsung anggaran *Automatic Adjustment* sekaligus menyesuaikan dengan target volume output dan melakukan pergeseran anggaran antar satker, Stasiun PSDKP Ambon melakukan penghapusan langsung anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 3.105.038.000
 - **Revisi DIPA ke 09** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 12 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 09 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp*

tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QDD.001.051.A. Perencanaan Pembinaan POKMASWAS sebesar Rp. 240.000 dan 2350.QDD.001.052.A.522151 Belanja Jasa Profesi sebesar Rp. 1.500.000 ke 2350.QDD.001.052.A. 522141 Belanja Sewa sebesar Rp. 1.740.000;
- ✓ Dari 2352.QIC.001.052.A. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi nasional ke 2352.QIC.001.053.A. Konsolidasi data dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi nasional sebesar Rp. 5.500.000;
- ✓ Dari 2353.BIC.001.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan ke 2353.BIC.001.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp. 3.048.000;
- ✓ Dari 2353.BIC.002.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan ke 2353.BIC.002.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp. 5.800.000;
- ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Ambon ke 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Satwas Ternate sebesar Rp. 450.000;
- ✓ Dari 2355.EBA.962.052.E. 521211 detail Pembuatan Banner ke 2355.EBA.962.052.E. 521211 detail Pembuatan Spanduk sebesar Rp. 1.570.000;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.001.A. 511129 Belanja Uang Makan PNS ke 2355.EBA.994.001.A. 512211 Belanja Uang Lembur sebesar Rp. 14.550.000;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.947.000 ke 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 975.000 dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 972.000.

- **Revisi DIPA ke 10** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 23 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 10 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QDD.001.051.A. Perencanaan Pembinaan POKMASWAS ke 2350.QDD.001.051.B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS sebesar Rp. 153.000;
- ✓ Dari 2351.AEA.002.052.A. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan ke 2351.AEA.002.053.A. Evaluasi Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.585.000;
- ✓ Dari 2352.BIC.001.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp. 385.000 dan 2352.BIC.001.052.A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi sebesar Rp. 2.374.000 ke 2352.BIC.001.053.A. Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp 2.759.000;
- ✓ Dari 2352.QIC.002.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan sebesar Rp. 59.000 dan 2352.QIC.002.052.A. Jumlah unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebesar Rp. 4.050.000 ke 2352.QIC.002.053.A. Konsolidasi Data dan Pelaporan Pengawasan Unit Usaha Pengawasan Destructive Fishing sebesar Rp 4.109.000;
- ✓ Dari 2353.BIC.002.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan ke 2353.BIC.002.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp 3.440.000;

- ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan ke 2353.QIC.003.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan lingkup UPT sebesar Rp 4.000.000;
- ✓ Dari 2355.EBA.962.052.E. Publikasi dan Dokumentasi ke 2355.EBA.962.052.A. Perjalanan Dinas Dan Koordinasi Dan Monitoring sebesar Rp 1.168.000;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 492.000, 2355.EBA.994.002.C. Langganan Aplikasi sebesar Rp. 285.000, 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 675.000 ke 2355.EBA.994.002.A. KKeperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp 1.452.000;
- ✓ Dari 2355.EBB.951.053.A.532111 detail Meja Kursi (Satwas) sebesar Rp. 16.000 dan 2355.EBB.951.053.A.532111 detail Lemari Arsip sebesar Rp. 10.000 ke 2355.EBB.951.053.A.532111 detail AC sebesar Rp 26.000.

*Realisasi
Pendapatan*

Rp11.456.855,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17,857,000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Denda Lainnya	17,857,000	-	-
Jumlah	17,857,000	-	-

Target pendapatan Stasiun PSDKP Ambon dengan estimasi sebesar Rp17.857.000,00 berasal dari pendapatan denda lainnya (425839), oleh karena Stasiun PSDKP Ambon belum memiliki bendahara penerimaan, maka pendapatan tersebut disetorkan langsung ke Sekretariat Jenderal PSDKP.

Realisasi Pendapatan selanjutnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.720.620,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan berasal dari Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan

bangunan.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	7,720,620	-
Jumlah	-	7,720,620	-

Rincian pendapatan antara lain dari :

- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Yudi Setiawan dan Zulkarnain sebesar Rp1.995.378,00 dengan nomor NTB: 000000351031 dan nomor NTPN : E85587QLU65VSOG0 tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Rizqi Tatri Kusuma sebesar Rp1.995.378,00 dengan nomor NTB: 000000339779 dan nomor NTPN : D9E543CIF1A1RO4T tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Puji Winarno sebesar Rp1.188.633,00 dengan nomor NTB: 000000327908 dan nomor NTPN : E4BB80N9VHISKNSC tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Abdul Quddus sebesar Rp2.541.231,00 dengan nomor NTB: 000000314132 dan nomor NTPN : 5C4C448VURSE8MHM tanggal 02 Februari 2022

Realisasi Pendapatan Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3,736,235,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penerimaan kembali belanja pegawai berupa tunjangan kinerja a.n Meykel Alelo yang telah dilakukan pembayaran melalui pemotongan gaji induk bulan Juni sebesar Rp936.100,00, bulan Juli sebesar Rp1.170.133,00, dan bulan Agustus sebesar Rp1.170.133,00. Hal ini disebabkan karena kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada bulan September - Desember 2021, dan Januari – Februari 2022.

- ✓ Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran internet Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022 sebesar Rp459.869,00 dengan nomor NTB : 000000303762 dan nomor NTPN : 5147C8N3E0OC9G4H tanggal 02 Februari 2022.

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara	11,456,855	30,953,684	(62.99)
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah Belanja	11,456,855	30,953,684	(62.99)

Total dari pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan serta pendapatan lain-lain senilai Rp11.456.855,00. Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya penurunan pendapatan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 62,99%, dikarenakan adanya pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan pada tahun lalu.

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja**

Negara

Rp17,929,273,964,00

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp17.929.273.964,00 atau 99,78% dari anggaran belanja sebesar Rp17.929.273.964,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,479,550,000	5,469,652,261	99.82
Belanja Barang	11,872,220,000	11,842,363,631	99.75
Belanja Modal	617,296,000	617,258,444	99.99
Total Belanja Kotor	17,969,066,000	17,929,274,336	99.78
Pengembalian	-	372	
Jumlah	17,969,066,000	17,929,273,964	99.78

Realisasi anggaran tahun 2022 menurut jenis belanja, seperti pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2022 penyerapan anggaran telah maksimal yaitu sebesar sebesar 99,78%.

Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	5,469,651,889	4,590,178,989	19.16
Belanja Barang	11,842,363,631	9,621,288,704	23.09
Belanja Modal	617,258,444	6,410,353,125	(90.37)
Jumlah Belanja	17,929,273,964	20,621,820,818	(13.06)

Realisasi belanja periode Tahunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 13,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain adanya belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*overhaul*) mesin induk KP. Hiu 13, serta belanja modal dan penambahan nilai Gedung dan bangunan kantor Stasiun PSDKP Ambon pada tahun lalu.

Belanja Pegawai
Rp5.469.651.889,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan periode Desember TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp5.469.651.889,00 dan Rp4.590.178.989,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dibandingkan dengan periode Tahunan TA 2021, realisasi belanja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 19,16% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya mutasi PNS dari beberapa instansi pemerintah sejumlah 6 (enam) orang pegawai, 1 (satu) orang pegawai dari Direktorat POA, 1 (satu) orang pegawai dari Kapal Pengawas (Stasiun PSDKP Tarakan), 2 (dua) orang pegawai dari Kapal Pengawas (Pangkalan PSDKP Bitung), dan 2 (dua) orang CPNS. Selain itu, terdapat tunjangan kinerja 13 dan 14 sebesar 50% dari tunjangan kinerja.

*Perbandingan Belanja Pegawai Sampai Dengan
Periode Desember TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,122,583,580	1,817,879,740	16.76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,816	30,273	18.31
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,301,498	131,975,196	16.92
Belanja Tunj. Anak PNS	46,173,594	38,223,482	20.80
Belanja Tunj. Struktural PNS	14,220,000	20,520,000	(30.70)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	42,340,000	38,480,000	10.03
Belanja Tunj. Beras PNS	140,784,480	120,579,300	16.76
Belanja Uang Makan PNS	274,658,000	244,894,000	12.15
Belanja Tunjangan Umum PNS	92,405,000	76,850,000	20.24
Belanja Uang Lembur	57,030,000	53,227,000	7.14
Belanja Tunj. Khusus/kegiatan/kinerja	2,525,120,583	2,047,520,692	23.33
Jumlah Belanja Kotor	5,469,652,551	4,590,179,683	19.16
Pengembalian Belanja	662	694	
Jumlah Belanja	5,469,651,889	4,590,178,989	19.16

Belanja Barang
Rp11.842.363.631,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan Desember TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,842,363,631,00 dan Rp9,621,288,704,00.

*Perbandingan Belanja Barang
Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1,684,014,157	1,695,548,198	(0.68)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	5,978,656,188	4,496,470,573	32.96
Belanja Barang Persediaan (5218)	142,250,420	120,834,700	17.72
Belanja Jasa (5221)	489,430,308	526,644,485	(7.07)
Belanja Pemeliharaan (5231)	2,051,676,007	1,369,446,295	49.82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	1,496,336,551	1,415,896,453	5.68
Jumlah Belanja Kotor	11,842,363,631	9,624,840,704	23.04
Pengembalian Belanja	0	3,552,000	
Jumlah Belanja	11,842,363,631	9,621,288,704	23.09

- Belanja barang operasional sebesar Rp1.684.014.157,00 terdiri dari : belanja untuk keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja dan belanja barang untuk operasional-penanganan pandemi COVID-19.
- Belanja barang non operasional sebesar Rp5.978.656.188,00 antara lain belanja bahan seperti cetak laporan, BBM, pelumas, air tawar kapal pengawas, belanja honor output kegiatan serta belanja barang non operasional lainnya seperti konsumsi rapat.
- Belanja barang persediaan barang konsumsi sebesar Rp142.250.420,00 meliputi belanja ATK, komputer Supply, dan suku cadang.
- Belanja barang jasa sebesar Rp489.430.308,00 meliputi belanja langganan listrik, telepon, air, belanja sewa, belanja jasa lainnya, belanja jasa profesi untuk menunjang kegiatan dan belanja jasa penanganan pandemi COVID-19.
- Belanja pemeliharaan sebesar Rp2.051.676.007,00, yang dilakukan untuk menjaga nilai aset-aset yang ada di Stasiun PSDKP Ambon antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan, kapal pengawas dan *speedboat/rubberboat* pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp1.496.336.551,00 meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota.

Stasiun PSDKP Ambon mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp30.183.000,00 Anggaran tersebut terserap 99,11% yakni sebesar Rp29.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (Masker)	18,075,000	18,075,000	100.00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Pemeriksaan Rapid Tes/Swab)	12,108,000	11,840,000	97.79
Jumlah		30,183,000	29,915,000	99.11

Belanja Modal
Rp617.258.444,0
0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Desember TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp617.258.444,00 dan Rp6.410.353.125,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang membeli manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258,466,600	999,285,430	(74.13)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	2,992,000		
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	355,799,844	1,419,400,840	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	153,971,700	(100.00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung		116,003,250	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		3,706,378,505	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	15,313,400	(100.00)
Belanja Modal lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	617,258,444	6,410,353,125	(90.37)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	617,258,444	6,410,353,125	(90.37)

Perbandingan nilai Belanja Modal Tahunan tahun 2022 dan 2021 pada tabel diatas, memperlihatkan adanya penurunan realisasi dikarenakan pada tahun yang lalu terdapat pembelian kendaraan bermotor pada belanja Peralatan dan Mesin. Selain itu terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan serta belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Penambahan Nilai Jaringan.

Belanja Modal Tanah Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Sawah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp617.258.444,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan periode Desember TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp617,258,444,00 dan Rp2,418,686,270,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Unit	1	355,799,844
Mesin kompresor	Unit	1	6,105,000
Lemari Penyimpan	Buah	2	10,189,800
Lemari Kayu	Buah	2	15,540,000
Meja Kerja Kayu	Buah	6	27,483,600
Kursi Besi/Metal	Buah	5	11,177,700
Tempat Tidur Kayu	Buah	1	21,589,500
A.C. Split	Buah	4	23,587,500
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split	Buah	0	2,992,000
Sound System	Unit	2	11,876,600
Dispenser	Buah	2	9,768,000
Mimbar/Podium	Buah	1	2,331,000
Coffee Maker	Buah	1	10,467,300
Fuel Flowmeter	Unit	1	5,387,000
PC	Buah	3	27,972,000
Laptop	Buah	5	62,759,400
Printer	Buah	4	12,232,200
Total		41	617,258,444

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	258,466,600	999,285,430	(74.13)
Pemasangan Peralatan dan Mesin	2,992,000	-	-
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	355,799,844	1,419,400,840	(74.93)
Jumlah Belanja Kotor	617,258,444	2,418,686,270	(74.48)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	617,258,444	2,418,686,270	(74.48)

Terjadi penurunan nilai belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, karena pada tahun 2021 terdapat kegiatan penambahan nilai peralatan dan mesin berupa

Overhaul mesin induk Kapal Pengawas Hiu 13, serta terdapat belanja peralatan dan mesin berupa minibus sebanyak 2 (dua) buah.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00,00 dan Rp3.976.353.455,00. Tidak terdapat belanja modal Gedung dan bangunan hingga periode 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Periode 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	153,971,700	(100.00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung		116,003,250	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	3,706,378,505	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	3,976,353,455	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	3,976,353,455	(100.00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan periode Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.313.400,00. Tidak terdapat belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	0.00
Belanja Modal Irigasi	-	-	0.00
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	15,313,400	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	15,313,400	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	15,313,400	0.00

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat belanja modal lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2022.

Belanja Bantuan Sosial Rp0,00

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Bulan Desember TA 2022 dan 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP belum SPJ	-	-
Saldo TUP	-	-
Kwitansi TUP belum SPJ	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Terdapat saldo Kas Lainnya Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Terdapat saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hask atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Belanja Dibayar di Muka Rp25.333.333,00

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25.333.333,00 dan Rp61.458.333,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang dan jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Beban sewa di Stasiun PSDKP Ambon antara lain :

⇒ Belanja sewa bangunan kantor Wilker Masohi senilai Rp5.500.000, masa kontrak dihitung mulai tanggal 30 Juni 2022 s.d 29 Juni 2023;

⇒ Sewa bangunan/rumah Gudang Barang Bukti Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp12.500.000,00 masa kontrak terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 s.d 19 Juni 2023;

⇒ Belanja sewa bangunan senilai Rp7.333.333,00 masa kontrak terhitung mulai tanggal 25 April 2022 s.d 24 April 2023.

*Uang Muka
Belanja
(prepayment)
Rp0,00*

C.5 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Tidak terdapat Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) hingga periode 31 Desember 2022 dan 2021. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp391.526.568,0
0*

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp391.526.568,00 dan Rp105.982.400,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan sampai dengan 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis Barang	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	44,212,240	33,156,900
Suku Cadang	347,314,328	72,825,500
Jumlah	391,526,568	105,982,400

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor : B.4879/PSDKPSta.7/PL.110/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp44.212.240,00, Persediaan suku cadang alat sebesar Rp347.314.328,00.

Persediaan barang konsumsi sebesar Rp44.212.240,00 terdiri dari alat tulis sebesar Rp1.561.340,00, tinta tulis tinta stempel sebesar Rp111.000,00, penjepit kertas sebesar Rp659.000,00, penghapus/korektor sebesar Rp119.500.000,00, buku tulis sebesar Rp61.000,00 ordner dan map sebesar Rp5.700.450,00, penggaris sebesar Rp50.000,00, cutter (alat tulis kantor) sebesar Rp116.000,00, alat perekat sebesar Rp269.500,00, staples sebesar Rp20.000,00, alat tulis kantor lainnya sebesar Rp169.500,00, kertas HVS sebesar Rp2.515.500,00, berbagai kertas Rp4.378.800,00, kertas cover Rp50.000,00, amplop

Rp2.420.000, kertas dan cover lainnya Rp240.000,00, Continuous Form sebesar Rp12.548.550,00, pita printer sebesar Rp150.000,00, tinta/toner printer Rp8.544.000,00, USB/FlashDisk Rp1.400.000,00, kartu memori sebesar Rp137.000,00, CD/DVD Drive Rp153.600,00, mouse sebesar Rp1.873.000,00, bahan komputer lainnya sebesar Rp.80.000,00, baterai Rp240.500,00, meterai sebesar Rp100.000, perlengkapan penunjang sebesar Rp419.000,00 serta alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp125.000,00.

Persediaan suku cadang sebesar Rp345.314.328,00, terdiri dari suku cadang alat angkutan apung bermotor sebesar Rp344.718.328,00 dan suku cadang lainnya Rp2.596.000,00. Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu 13. Rincian BAOFP terdapat pada lampiran.

Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang persediaan pada barang konsumsi dan suku cadang, sebagai berikut :

Rincian Mutasi Persediaan di Satker Stasiun PSDKP Ambon

Per 31 Desember 2022

Akun	Uraian Akun	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Flutuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	33.156.900	11.055.340	44.212.240	33,34
117112	Amunisi	0	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
117114	Suku Cadang	72.825.500	274.488.828	347.314.328	376,91
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan	0	0	0	0

	kepada Masyarakat - Dalam				
117131	Bahan Baku	0	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total		105.982.400	285.544.168	391.526.568	269,43

Tanah

Rp6.248.730.383
,00

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.248.730.383,00 dan Rp6.248.730.383,00. Mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	6.248.730.383
Mutasi tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2022	6.248.730.383
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6.248.730.383

Tanah pada Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.248.730.383 yang terdiri dari tanah seluas 5.838 m². Rincian data Tanah berdasarkan letak dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

No	Lokasi/Alamat Aset Tanah	Luasan (m ²)	Bukti Kepemilikan	Pengguna
1	Dwi Warna, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah	572	SHP No. 00006	Satwas SDKP SBT
2	Jl. Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon	5266	SHP No. 45 & 46	Stasiun PSDKP Ambon

Peralatan dan
Mesin
Rp43.865.409.65
1,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp43.865.409.651,00 dan 43.356.586.207,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	43,356,586,207
Mutasi tambah :	778,055,073
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2,992,000
Pembelian	258,466,600
Reklas Masuk	160,796,629
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	355,799,844
Mutasi Kurang :	(269,231,629)
Reklas Keluar	(160,796,629)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(108,435,000)
Saldo per 31 Desember 2022	43,865,409,651
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	29,947,883,558
Nilai Buku per 31 Desember 2022	13,917,526,093

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp43.865.409.651,00. Saldo mengalami perubahan pada periode Tahunan 2022 dengan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang.

⇒ Mutasi tambah sebesar Rp778.055.073,00, yang terdiri atas :

- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp2.992.000,00 terhadap 2 (dua) unit AC split.
- Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp258.466.600,00.
- Reklas Masuk senilai Rp160.796.629,00.
- Pengembangan Nilai Aset senilai Rp355.799.844,00 berupa general overhaule Auxiliary Engine Kapal Pengawas Hiu 13.

⇒ Mutasi kurang senilai Rp(269.231.629,00), antara lain :

- Reklas keluar senilai Rp(160.796.629,00).
- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp(108.435.000,00) berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (buah) peta, dan 1 (satu) buah internet.

Gedung dan
Bangunan
Rp7.288.390.955
,00

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp7.288.390.955,00 dan Rp7.288.390.955,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7,288,390,955
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2022	7,288,390,955
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	485,472,659
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6,802,918,296

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2022 sama dengan saldo 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.288.390.955,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang hingga periode Desember 2022.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp498.761.400,00*

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp498.761.400,00 dan Rp512.761.400,00. Rincian mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	512,761,400
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	(14,000,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14,000,000)
Saldo per 31 Desember 2022	498,761,400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	61,604,070
Nilai Buku per 31 Desember 2022	437,157,330

Terdapat mutasi kurang hingga periode Tahunan 2022 yaitu Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada Jaringan Pembawa kapasitas sedang sebesar Rp(14.000.000,00).

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,00*

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp7.975.000,00. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7,975,000
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	(7,975,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(7,975,000)
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

⇒ Mutasi Kurang :

Berupa penghapusan 1 (satu) buah peta pada satker Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp 7.975.000,00 yang diperoleh melalui transfer masuk dari UPT. Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan BAST No. 977/Lan.6/PL.933/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp239.903.713,0
0*

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp239.903.713,00 dan Rp239.903.713,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	239,903,713
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2022	239,903,713

Tidak terdapat transaksi mutasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan hingga 31 Desember 2022. Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Stasiun PSDKP Ambon, antara lain :

- Transaksi KDP Henti Sementara karena adanya pemotongan anggaran terkait Corona Virus 19 di tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Pimpinan dengan NUP 5 senilai Rp43.035.300,00 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang Logistik, dengan NUP 6 senilai Rp42.896.713,00 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
- Transaksi KDP Henti Sementara karena adanya pemotongan anggaran terkait Corona Virus 19 di tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Transaksi Perolehan KDP berupa Administrasi Proyek sebanyak 2 (Dua) kontrak senilai Rp29.239.000,00.

Rincian Perolehan KDP adalah sebagai berikut :

- Administrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Seram Bagian Timur, nomor kontrak 094/Sta.7/PPK/V/2022, dikerjakan oleh CV. Data Teknik, dengan waktu pekerjaan (perencanaan) tanggal 04 Mei 2022 – 29 November 2022 senilai Rp20.749.153,00;
- Adminitrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Mess

Operator Satwas PSDKP Seram Bagian Timur, nomor kontrak 012/Sta,7/PPK/II/2021, dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati, dengan waktu pekerjaan tanggal 04 Mei 2022– 29 November 2022 senilai Rp8.490.000,00.

Transaksi Pengembangan KDP berupa Perencanaan dan Administrasi Proyek sebanyak 5 transaksi senilai Rp124.732.700,00. Rincian Pengembangan KDP adalah sebagai berikut :

- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp8.430.000,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
- Pembayaran Termin I Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp67.716.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
- Pembayaran Termin I Perencanaan Pembangunan Bangunan/mass operator dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati senilai Rp46.956.800,00 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp842.550,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati senilai Rp787.350,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(30.494.960.287,00)*

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing- masing Rp(30.494.960.287,00) dan Rp(27.337.131.383,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6,248,730,383	-	6,248,730,383
2	Peralatan dan Mesin	43,865,409,651	29,947,883,558	13,917,526,093
3	Gedung dan bangunan	7,288,390,955	485,472,659	6,802,918,296
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	498,761,400	61,604,070	437,157,330
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		57,901,292,389	30,494,960,287	27,406,332,102

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Ambon.

*Aset Lain-Lain
Rp85.120.000,00*

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp85.120.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2,115,120,000
Mutasi tambah :	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	85,120,000
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2022	2,200,240,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2,200,240,000

Terdapat mutasi tambah pada Aset lain – lain yaitu aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah berupa henti guna 4 (empat) unit motor.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(85.120.000,00)*

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(85.120.000,00) dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0,00*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari

KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp25.728.553,00

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.728.553,00 dan Rp10.914.681,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian utang kepada pihak ketiga :

1. Biaya langganan listrik Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Mess Stasiun PSDKP Ambon, dan kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu bulan Desember 2022 sebesar Rp 8.457.553,00;
2. Biaya langganan air Kantor Satwas SDKP Ternate, kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu, kantor Satwas SDKP Wilker Masohi, dan kantor Satwas SDKP Wilker Banda bulan Desember 2022 sebesar Rp 2.967.000,00;
3. Belanja uang makan pegawai tanggal 15 s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp13.744.000,00 ;
4. Belanja uang makan pegawai a.n AKADIF ODE ALI bulan Nopember 2022 sebesar Rp560.000,00.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0,00

C.19 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas Rp28.037.367.163,00

C.20 Ekuitas

Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.037.367.163,00 dan Rp30.473.742.327,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN EKUITAS	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Akhir	28,037,367,163	30,473,742,327	(7.99)
Jumlah Ekuitas	28,037,367,163	30,473,742,327	(7.99)

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp10.996.986,0

0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.996.986,00 dan Rp1.535.000,00.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,996,986	1,535,000	-
Jumlah Ekuitas	10,996,986	1,535,000	-

Rincian pendapatan antara lain dari :

- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Yudi Setiawan dan Zulkarnain sebesar Rp1.995.378,00 dengan nomor NTB: 000000351031 dan nomor NTPN : E85587QLU65VSOGO tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Rizqi Tatri Kusuma sebesar Rp1.995.378,00 dengan nomor NTB: 000000339779 dan nomor NTPN : D9E543CIF1A1RO4T tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Puji Winarno sebesar Rp1.188.633,00 dengan nomor NTB: 000000327908 dan nomor NTPN : E4BB80N9VHISKNSC tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan berupa pengembalian sewa rumah negara a.n Abdul Quddus sebesar Rp2.541.231,00 dengan nomor NTB: 000000314132 dan nomor NTPN : 5C4C448VURSE8MHM tanggal 02 Februari 2022.
- ✓ Penerimaan kembali belanja pegawai berupa tunjangan kinerja a.n Meykel Alelo yang telah dilakukan pembayaran melalui pemotongan gaji induk bulan Juni sebesar Rp936.100,00, bulan Juli sebesar Rp1.170.133,00, dan bulan Agustus sebesar Rp1.170.133,00. Hal ini disebabkan karena kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada bulan September - Desember 2021, dan Januari - Februari 2022.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

5.483.955.889,00

Jumlah beban Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan periode Desember TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp5.483.955.889,00 dan Rp4.584.586.989,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dibandingkan dengan TA 2021, beban belanja pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 35,89 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya mutasi PNS dari beberapa instansi pusat maupun daerah, dan 2 (dua) orang CPNS. Selain itu, terdapat tunjangan kinerja 13 dan 14 sebesar 50% dari tunjangan kinerja. Rincian beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,122,583,580	1,817,879,740	16.76
Beban Pembulatan Gaji PNS	35,154	29,579	18.85
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	154,301,498	131,975,196	16.92
Beban Tunj. Anak PNS	46,173,594	38,223,482	20.80
Beban Tunj. Struktural PNS	14,220,000	20,520,000	(30.70)
Beban Tunj. Fungsional PNS	42,340,000	38,480,000	10.03
Beban Tunj. Beras PNS	140,784,480	120,579,300	16.76
Beban Uang Makan PNS	288,962,000	239,302,000	20.75
Beban Tunjangan Umum PNS	92,405,000	76,850,000	20.24
Beban Uang Lembur	57,030,000	53,227,000	7.14
Beban Tunj. Khusus/kegiatan/kinerja	2,525,120,583	2,047,520,692	23.33
Jumlah Beban Pegawai	5,483,955,889	4,584,586,989	19.62

Penjelasan selisih beban pegawai di Laporan Operasional (LO) tidak sama dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp14.304.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH NETTO REALISASI 51	5,469,651,889
JUMLAH BEBAN PEGAWAI LO	5,483,955,889
SELISIH	-14,304,000
PENJELASAN SELISIH	
Jurnal Penyesuain AkruaI	
Jurnal Penyesuaian atas belanja uang makan PNS terhitung tanggal 15 s.d 31 Desember 2022	13,744,000
Belanja Pegawai berupa uang makan pegawai a.n AKADIF ODE ALI bulan Nopember 2022	560,000
Jumlah	14,304,000

Beban

Persediaan

Rp131.195.080,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan bulan September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp131.195.080,00 dan Rp149.437.100,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	131,195,080	149,437,100	(44.82)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	131,195,080	149,437,100	(44.82)

Beban Barang

dan Jasa

Rp8.188.735.525,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8,188,735,525,00 dan Rp6,756,771,134,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	1,406,975,742	1,247,698,372	12.77
Beban penambah daya tahan tubuh	99,764,215	109,555,084	(8.94)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,029,200	18,577,760	(24.48)
Beban honor Operasional Satuan Kerja	145,170,000	180,240,000	(19.46)
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID -19	18,075,000	138,602,982	(86.96)
Beban Bahan	5,353,212,892	3,908,606,073	36.96
Belanja Honor Output Kegiatan	9,550,000	56,520,000	(83.10)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	615,893,296	531,344,500	15.91
Beban Langganan Listrik	135,829,921	108,233,226	25.50
Beban Langganan Telpon	97,085,248	106,721,961	(9.03)
Beban Langganan Air	40,085,500	27,134,500	47.73
Beban Sewa	115,425,000	116,277,576	(0.73)
Beban Jasa Profesi	25,700,000	5,800,000	
Beban Jasa Lainnya	100,099,511	105,185,100	(4.83)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID -19	11,840,000	96,274,000	(87.70)
Jumlah	8,188,735,525	6,756,771,134	21.19

Penjelasan selisih beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (LO) tidak sama dengan realisasi belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Deskripsi Transaksi	Jumlah Debet
JURNAL BALIK BIAYA LANGGANAN INTERNET KANTOR STASIUN PSDKP AMBON (WAILELA) BULAN DESEMBER 2021	(2,467,000.00)
JURNAL BALIK BIAYA LANGGANAN LISTRIK KANTOR STASIUN PSDKP AMBON (WAILELA) BULAN DESEMBER 2021	(6,200,763.00)
JURNAL BALIK BIAYA LANGGANAN LISTRIK KANTOR SATWAS SDKP WILKER TULEHU BULAN DESEMBER 2021	(250,416.00)
JURNAL BALIK BIAYA LANGGANAN LISTRIK STASIUN PSDKP AMBON (MESS) BULAN DESEMBER 2021	(956,502.00)
Jurnal balik langganan air Kantor Satwas SDKP Ternate bulan Desember 2021	(1,040,000.00)
Jurnal balik Sewa rumah a.n Didik Cipto Suryono, S.St.Pi masa kontrak terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 s.d 20 Februari 2022	4,166,667
masa kontrak terhitung mulai tanggal 03 April 2021 s.d 02 April 2022	6,250,000
kontrak terhitung mulai tanggal 25 April 2021 s.d 24 April 2022	7,500,000
Jurnal balik sewa kantor Wilker PSDKP Geser masa kontrak terhitung mulai tanggal 04 Juni 2021 s.d 04 Juni 2022	5,958,333
Jurnal balik Sewa kantor Wilker PSDKP Masohi masa kontrak terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 15 Juni 2022	4,583,333
Jurnal balik Sewa kantor Wilker PSDKP Tulehu masa kontrak terhitung mulai tanggal 16 November 2021 s.d 16 November 2022	16,500,000
Jurnal balik Sewa kantor Wilker PSDKP Bula masa kontrak terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 s.d 10 Desember 2022	16,500,000
Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Mess Stasiun PSDKP Ambon, dan kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu bulan Desember 2022	8,457,553
Jurnal Penyesuaian atas biaya langganan air Kantor Satwas Ternate, kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu, kantor Satwas SDKP Wilker Masohi, dan kantor Satwas SDKP Wilker Banda bulan Desember 2022	2,967,000
Jurnal Penyesuaian atas belanja sewa bangunan kantor Wilker PSDKP Masohi senilai Rp.5.500.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 30 Juni 2022 s.d 29 Juni 2023	(5,500,000.00)
Gudang Barang Bukti Stasiun PSDKP senilai 12.500.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 s.d 19 Juni 2023	(12,500,000.00)
Rp.7.333.333 masa kontrak terhitung mulai tanggal 25 April 2022 s.d 24 April 2023	(7,333,333.00)
Total	36,634,872

Beban

Pemeliharaan

Rp1.873.396.979,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.873.396.979,00 dan Rp1.434.819.295,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan September Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,265,457	204,483,800	(5.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	910,759,562	1,164,962,495	(21.82)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	768,371,960	65,373,000	1,075.37
Jumlah	1,873,396,979	1,434,819,295	30.57

Beban

Perjalanan Dinas

Rp1.496.336.551,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.496.336.551,00 dan Rp1.413.988.453,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban Perjalanan Dinas dikarenakan masa Pandemi Covid-19 sudah menurun dan kemudian banyak kegiatan dibuka kembali. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,066,295,899	748,175,840	42.52
Beban Perjalanan Tetap	-	134,700,334	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,950,000	105,750,000	1.13
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	93,092,700	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	308,090,652	332,269,579	(7.28)
Jumlah	1,496,336,551	1,413,988,453	5.82

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.271.208.19
3,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.271.208.193,00 dan Rp3.939.982.960,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,106,232,386	3,812,657,744	(18.53)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	153,436,917	115,765,680	32.54
Beban Penyusutan Irigasi	8,233,934	8,233,934	-
Beban Penyusutan Jaringan	3,304,956	3,325,602	(0.62)
Jumlah	3,271,208,193	3,939,982,960	(16.97)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp459.869,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp459.869,00 dan Rp8.932.084,00. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai dengan
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	459,869	8,932,084	(94.85)
Beban dari Kegiatan Non	-	-	-
Jumlah	459,869	8,932,084	(94.85)

Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran internet Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2021 sebesar Rp459.869,00 dengan nomor NTB : 000000303762 dan nomor NTPN : 5147C8N3E0OC9G4H tanggal 02 Februari 2022.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp30.473.742.327,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon untuk periode 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 masing-masing adalah sebesar Rp30.473.742.327,00 dan Rp29.869.932.568,00

Defisit LO

Rp(20.449.513.034,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp(20.449.513.034,00) dan Rp(19.880.352.073,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp2.102.961,00

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.102.961,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian koreksi aset tetap non revaluasi sebagai berikut :

Uraian	Tanggal Jurnal	Deskripsi	Nilai
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31-Aug-22	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split	(1,496,000)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31-Aug-22	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split	149,600
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31-Aug-22	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split	(1,496,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Internet	(15,615,000)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31-Aug-22	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split	149,600
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	3,850,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	3,850,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	(3,850,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	(3,850,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	3,850,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	(3,850,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	(3,850,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Peta	3,850,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Laporan	7,975,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	14,000,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Laporan	(7,975,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	(5,833,328)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	(14,000,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	5,833,328
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Internet	15,615,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	25,090,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Internet	(15,615,000)

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	15-Aug-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Internet	15,615,000
Reklasifikasi Masuk	20-Sep-22	Reklasifikasi Masuk Alat Pendingin Lainnya	471,430
Reklasifikasi Masuk	29-Sep-22	Reklasifikasi Masuk Kursi Dorong	(247,500)
Reklasifikasi Masuk	29-Sep-22	Reklasifikasi Masuk Uninterruptible Power Supply (UPS)	365,909
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	22,530,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(22,530,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(17,500,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(22,530,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	22,530,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	17,500,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(17,500,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	17,500,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	20,000,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(20,000,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(20,000,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	20,000,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	25,090,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(25,090,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17-Nov-22	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor	(25,090,000)
Jumlah			(2,102,961)

Koreksi Lain -
Lain Rp0,00

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Stasiun SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp18.011.034.9
09,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp18.011.034.909,00 dan Rp20.484.161.832,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar entitas	TH 2022	TH 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	17,929,273,964	20,621,820,818
Diterima dari Entitas Lain	(11,456,855)	(30,953,684)
Transfer Masuk	93,217,800.0	
Transfer Keluar		(106,705,302.0)
Pengesahan Hibah Langsung		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	18,011,034,909	20,484,161,832

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). sampai dengan 31 Desember 2022, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp(11.456.855,00) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp17.929.273.964,00. Rincian Diterima dari entitas berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, antara lain :

- ✓ Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan sebesar Rp7.720.620,00;
- ✓ Pendapatan Lain – lain yaitu penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp459.869,00 dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp3.276.366,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp93.217.800,00. Sedangkan

transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Rp0,00.

Ekuitas Akhir
Rp28.037.367.1
63,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.037.367.163,00 dan Rp30.473.742.327,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Temuan dan Tindak lanjut Temuan Inspektorat Jenderal

⇒ Berdasarkan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor. ST-20.01.6/ITJ/TU.350/I/2022, tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 di Stasiun PSDKP Ambon dari tanggal 26 Januari s.d. 1 Februari 2022, melalui Hasil Pemantauan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ TA 2021 Stasiun PSDKP Ambon, dimana Itjen KKP merekomendasikan agar :

1. Memerintahkan PPK agar :
 - Melengkapi kekurangan dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan dan PBJ sebagaimana hasil pemantauan;
 - Memepertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tagihan langganan internet PT. Telkom senilai Rp459.869,00, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
 - Meminta jaminan senilai Rp9.751.500,00 dengan masa berlaku sampai 17 Mei 2022 kepada CV Rekaprima selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Perluasan Bangunan Pos Pengawasan PSDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II.
2. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk :
 - Memungut sewa rumah negara Tahun 2021 untuk pemanfaatan rumah dinas di Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp2.541.231,00, Satwas SDKP Ternate senilai Rp3.990.756,00, dan Satwas SDKP Halmahera Selatan senilai Rp1.188.633,60, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
 - Melakukan perhitungan sewa rumah negara Tahun 2022 berdasarkan Harga Satuan Bangunan Rumah Negara TA 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon, Kota Ternate, dan Kab. Halmahera Selatan, untuk selanjutnya memungut sewa negara setiap bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen KKP, Stasiun PSDKP Ambon telah menindaklanjuti melalui surat Nomor : B.448/PSDKPSta.7/TU.210/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal tindak lanjut hasil pemantauan.

⇒ Berdasarkan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor : R.79/ITJ.2/HP.550/IV/2022, tanggal 14 April 2022 perihal Laporan Hasil Audit Kinerja pada Stasiun PSDKP Ambon Provinsi Maluku TA 2021-2022, antara lain :

1. Terdapat Pelaksanaan Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam yang Tidak Sesuai Ketentuan (2.02.06)

a) Dimana Itjen KKP merekomendasikan selaku Pengendali Operasi agar :

- Menyusun rencana operasi Kapal Pengawas Perikanan antara lain kelengkapan peta operasi, analisis indikasi kerawanan, dan kondisi perkiraan cuaca dan gelombang ;
- Menyusun laporan Evaluasi Operasional Kapal Pengawas Perikanan dengan memuat, antara lain hasil identifikasi daerah perairan dengan potensi tinggi tindakan pelanggaran dan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan, serta informasi hasil operasi di perairan yang diawasi. Selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di pemantauan dan operasi armada ; dan

b) Mengintruksikan Nakhoda KP Hiu 13 dan Operator/Nahkoda speedboat untuk melaksanakan operasi pengawasan sesuai surat tugas dan melaporkan pelaksanaan operasi, termasuk informasi kesesuaian pelaksanaan operasi dengan perencanaan operasi, serta jika ada kondisi tertentu atau darurat.

2. Terdapat Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (2.02.06)

Kepada Kepala Stasiun PSDKP Ambon direkomendasikan agar:

- Menginstruksikan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan memedomani Juknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- Melakukan pemeriksaan ulang terhadap pelaku usaha, yaitu PT Maluku Prima Makmur, PT Harta Samudera, CV Adfani Bintang Samudera, PT Wahana Lestari Investama, PT Peduli Laut Maluku, PT Perikanan Nusantara, CV Markindo Raya, PT Maluku Prima Sukses, dan PT Sanana Pelangi Indonesia; PT Sumber Laut Utama, PT Anugerah Tehoru Manise, PT Mina Maluku Sejahtera, BUMD Prima Niaga Halsel, CV Inti Samudera Dzathan, Pelaku usaha

Rusli Sibela, Syahril Ipa, Tuna Pertada, Kelompok Pasar Bambu, dan PT Wahana Lestari, untuk selanjutnya melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat terkait hasil pengawasan tersebut ; dan

- Menginstruksikan PPK dalam memfasilitasi biaya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan kecukupan hari pengawasan.

3. Terdapat Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (2.02.06)

Kepada Kepala Stasiun PSDKP Ambon direkomendasikan agar:

- Menginstruksikan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan supaya pelaksanaan tugas memedomani Juknis, termasuk penggunaan peralatan penunjang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
- Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat terkait hasil pengawasan terhadap PT Maluku Prima Makmur, PT Inti Mas Surya, dan UD Sumber Rejeki;
- Mengusulkan pengadaan sarana prasarana penunjang pengawasan berupa alat uji limbah cair, antara lain DO dan BOD meter kepada Sekretaris Ditjen PSDKP.

4. Terdapat Kesalahan Penggunaan Akun pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (1.04.15)

Kepada Kepala Stasiun PSDKP Ambon direkomendasikan agar menginstruksikan petugas BMN untuk melakukan kapitalisasi biaya pemasangan 2 unit AC Split 2 PK senilai Rp2.992.000,00 menjadi aset tetap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen KKP, Stasiun PSDKP Ambon telah menindaklanjuti melalui surat Nomor : B.1945/PSDKPSt.7/TU.210/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja pada Stasiun PSDKP Ambon Provinsi Maluku TA 2021-2022.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 17 November 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 4441-7410-4771-0630 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 ini, Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan keterangan sebagai berikut :

- **Revisi DIPA ke 01** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3739-0109-5408-0027 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 01 merupakan revisi kewenangan DJA. Digital Stamp mengalami perubahan, karena revisi 1 merupakan revisi *Refocusing* (pemblokiran) sebesar Rp900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ 2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp77.000.000,00
- ✓ 2350.RCG.OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp101.753.000,00
- ✓ 2352.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp6.600.000,00
- ✓ 2352.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp223.847.000,00
- ✓ 2353.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp19.500.000,00
- ✓ 2353.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp150.500.000,00
- ✓ 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp90.000.000,00
- ✓ 2355.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp55.000.000,00
- ✓ 2355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp175.800.000,00

- **Revisi DIPA ke 02** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 11 April 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3739-0109-5408-0027 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00.

Revisi 02 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi 2 merupakan revisi pemanfaatan dan perubahan Halaman III DIPA. Adapun usulan pemanfaatan dan perubahan tersebut antara lain:

- ✓ Penggabungan dan perubahan detail Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Pelaksanaan Perkara Sanksi Administratif yaitu Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif Stasiun/Satwas/Wilker SDKP (Rp6.000.000,00) dan Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi Administratif ke pusat (Rp16.000.000,00) menjadi Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif Stasiun/Satwas/Wilker SDKP (Rp22.000.000,00)
- ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp3.500.000,00 ke Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi pada Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp900.000,00 dan Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.600.000,00.
- ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Konsolidasi Data dan Pelaporan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan ke Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Pelaksanaan Pemeriksaan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan sebesar Rp3.525.000,00.
- ✓ Pergeseran anggaran Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi dari Akun 521211 Belanja Bahan ke Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.000.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota – Pemeriksaan pelaku usaha kapal perikanan antara lain Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha Bidang Perikanan Tangkap (dari anggaran Rp30.000.000,00 menjadi Rp23.100.000,00, Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Pengawasan Ikan Hasil Tangkapan (Cirebon) (dari anggaran Rp19.000.000,00 menjadi Rp18.300.000,00) dan

- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan (Rp7.600.000,00)
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota – Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan antara lain Perjalanan Dinas Bimtek Identifikasi Taksonomi Ikan (Yogyakarta) (dari anggaran Rp18.000.000,00 menjadi Rp22.710.000,00) dan Perjalanan Dinas Bimtek Tata Cara Pengawasan Berusaha Subsektor Pembudidayaan Ikan (Sulawesi Selatan) (dari anggaran Rp12.000.000,00 menjadi Rp7.290.000,00)
 - ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya – Pengadaan Seragam antara lain Pakaian Dinas Harian PSDKP PNS (dari anggaran Rp44.200.000,00 menjadi Rp39.950.000,00), Emblem Kabaret (Rp2.550.000,00) dan Kabaret (Rp1.700.000,00)
 - ✓ Pergeseran anggaran Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19 dari Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 ke Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp16.800.000,00.
 - ✓ Pergeseran anggaran pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari Pemeliharaan Kantor (Rp4.800.000,00) dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Rp7.440.000,00) ke Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Rp9.240.000,00) dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Rp3.000.000,00)
 - ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran antara lain AC 2 PK (Rp15.900.000,00), AC ½ PK (Rp440.000,00), Kursi Kerja Satwas (Rp3.660.000,00), Meja Kerja Satwas (Rp7.320.000,00), Meja Kerja UPT (Rp20.200.000,00), Podium (Rp2.350.000,00), Lemari Pakaian (Rp15.540.000,00), Tempat Tidur (Rp21.700.000,00), Mesin Pembuat Kopi (Rp10.560.000,00), Kursi Kerja UPT (Rp7.650.000,00), Lemari Arsip (Rp10.200.000,00) dan Speaker (Rp5.480.000,00)

- ✓ Pergeseran anggaran dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai ke Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Administrasi Mutasi Pegawai sebesar Rp20.000.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional pada Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa antara lain Perjalanan Dinas Uji Kompetensi JFT Pengawas Perikanan (dari anggaran Rp16.000.000,00 menjadi Rp7.000.000,00) dan Perjalanan Dinas Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Rp8.500.000,00), serta pergeseran ke Akun 521211 Belanja Bahan antara lain Perlengkapan Uji Kompetensi JFT Pengawas Perikanan sebesar Rp500.000,00.
- ✓ Pemanfaatan anggaran pada Akun 521211 Belanja Bahan – Penyusunan Laporan Kegiatan antara lain Penggandaan dan Penjilidan Laporan Tahunan (dari anggaran Rp50.000,00 menjadi Rp200.000,00), Penggandaan dan Penjilidan Laporan Bulanan (dari anggaran Rp2.400.000,00 menjadi Rp1.500.000,00), Penggandaan dan Penjilidan Laporan LKJ Triwulanan (dari anggaran Rp200.000,00 menjadi Rp800.000,00), dan Penggandaan dan Penjilidan Laporan LKJ Tahunan (dari anggaran Rp50.000,00 menjadi Rp200.000,00).
- **Revisi DIPA ke 03** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 06 September 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 4826-0272-7467-4080 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 03 merupakan revisi kewenangan DJA. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.
Revisi ke 03 merupakan Revisi *Refocusing* (pemblokiran) sebesar Rp. 2.138.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ 2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp647.821.000,00;
 - ✓ 2350.RCG. OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp940.151.000,00;
 - ✓ 2351.BCE. Penanganan Perkara sebesar Rp161.721.000,00;
 - ✓ 2352.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp37.947.000,00;

- ✓ 2353.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp58.275.000,00;
 - ✓ 2353.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp189.585.000,00;
 - ✓ 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp43.050.000,00;
 - ✓ 2355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp59.450.000,00.
- Adapun pergeseran anggaran antara lain :
- ✓ Dari Akun 521211 Belanja Bahan (Air Bersih) – Dukungan Logistik Kapal Pengawas ke Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13) – Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp1.280.000,00;
 - ✓ Pada Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas, dari Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Rangka Perjalanan Dinas Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP) ke Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13) sebesar Rp12.000.000,00.

- **Revisi DIPA ke 04** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Juli 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 5527-7098-3787-9637 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi 04 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.

Revisi ke 04 merupakan usulan revisi anggaran dalam rangka revisi halaman III DIPA dan revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya, menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi serta pergeseran anggaran dalam KRO yang sama, serta revisi antar belanja, yaitu dari belanja 52 ke belanja 53. Revisi antar belanja pada KRO 2350 RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Revisi ini dimaksudkan untuk memenuhi belanja modal belanja pemasangan peralatan dan mesin sebesar Rp2.992.000 yang diambil dari belanja 52 dalam KRO yang sama.

- **Revisi DIPA ke 05** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 3407-6011-0025-4365 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.539.539.000,00. Revisi ke

05 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QHD.001.052.A. Dukungan Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp. 51.969.000,00 dan 2350.QHD.001.052.C. Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 19.458.000,00 ke 2350.QHD.001.052.E. Penyebaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan sebesar Rp. 15.483.000,- dan 2350.QHD.001.052.F. Pengadaan Seragam Awak Kapal Pengawas sebesar Rp 55.584.000,00;
- ✓ Dari 2350.QHD.003.051. Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas ke 2350.QHD.003.052. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas sebesar Rp. 264.000,- serta 2350.QHD.003.052.B. Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar) sebesar Rp. 1.937.000,00 ke 2350.QHD.003.052.A. Operasional Speed Boat 8 Meter sebesar Rp. 2.201.000,00;
- ✓ Dari 2350.RCG.001.052.A. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas sebesar Rp. 19.656.000,00, 2350.RCG.001.052.B. Perawatan Prediktif Kapal Pengawas sebesar Rp. 6.375.000,00, 2350.RCG.001.052.D. Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat sebesar Rp. 7.956.000,-, 2350.RCG.001.052.E. Perawatan Prediktif Speed Boat Pengawas sebesar Rp. 20.227.000,00 dan 2350.RCG.001.052.F. Perawatan Darurat Speed Boat Pengawas sebesar Rp. 29.000.000,00 ke 2350.RCG.001.052.C. Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp. 83.214.000,00;
- ✓ Dari 2355.EBC.956. Layanan BMN sebesar Rp. 1.300.000,- dan 2355.EBA.994. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 360.000,00 ke 2355.EBA.962. Layanan Umum sebesar Rp. 1.660.000,00;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 4.300.000,00, 2355.EBA.994.001.A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNSsebesar Rp. 3.400.000,00, 2355.EBA.994.001.A.511124 Belanja Tunj. Fungsional

- PNS sebesar Rp. 2.700.000,00 ke 2355.EBA.994.001.A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri
- PNS sebesar Rp. 100.000,00, 2355.EBA.994.001.A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp. 800.000,-, 2355.EBA.994.001.A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS sebesar Rp. 3.000.000,00 dan 2355.EBA.994.001.A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp. 6.500.000,00;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 30.850.000,00 ke 2355.EBA.994.002.A. Keperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp. 890.000,- 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 500.000,00 dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 29.100.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBC.954.053.B. Administrasi Mutasi Pegawai sebesar Rp. 1.736.000,- dan 2355.EBC.954.053.C. Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 16.000.000,00 ke 2355.EBC.954.053.A. Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai sebesar Rp. 17.736.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 790.000,00, 2355.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 2.362.000,- dan 2355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp. 1.487.000,- ke 2355.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 4.639.000,00

- **Revisi DIPA ke 06** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 0124-8068-1170-3068 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.074.104.000,00. Revisi ke 06 merupakan revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Terdapat kekurangan belanja pegawai senilai Rp549.565.000,00 yang diperuntukkan guna pembayaran THR dan Gaji Ke-13. Selain itu, Stasiun PSDKP Ambon mendapatkan tambahan 2 CPNS pada

tahun 2022, sehingga anggaran belanja pegawai Stasiun PSDKP Ambon belum tercukupi sampai dengan akhir tahun 2022;

- ✓ Belum tercukupinya anggaran perawatan darurat Kapal Pengawas Hiu 13. Kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas Hiu 13 sebesar Rp84.000.000,00 dikarenakan Permintaan Gubernur dan Soket Gubernur Genset Kanan dan Genset Kiri serta Kerusakan Display Genset Kanan pada KP. Hiu 13. Pemenuhan kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas berasal dari pergeseran antar KRO PN yaitu dari KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam ke 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan dalam RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat. Adapun pergeseran ini tidak mengubah volume output;
- ✓ Pergeseran anggaran belanja modal pada KRO 2355.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ke KRO 2355.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp3.312.000,00. Adapun pergeseran dimaksud untuk memenuhi belanja lensa kamera dalam rangka mendukung kegiatan Kehumasan Stasiun PSDKP Ambon. Pergeseran anggaran menyebabkan perubahan volume dari 22 unit menjadi 23 unit;
- ✓ Pergeseran antar KRO dan RO dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu :
 1. Penambahan anggaran pada RO 2355.EBA.962 Layanan Umum sebesar Rp45.600.000,00, dimaksudkan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas undangan/koordinasi yang mana sampai dengan akhir tahun belum tercukupi. Selain itu, penambahan anggaran untuk pengadaan seragam Pakaian Olahraga untuk seluruh pegawai Stasiun PSDKP Ambon.
 2. Penambahan anggaran pada RO 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan sebesar

Rp14.508.000,00, untuk memenuhi belanja perjalanan dinas Rekonsiliasi SAIBA Tahunan

- **Revisi DIPA ke 07** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 16 November 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 0124-8068-1170-3068 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 21.074.104.000,00. Revisi ke 07 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QHD.001.052.A. Dukungan Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp. 4.105.000,00 dan 2350.QHD.001.052.E. Penyegaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan sebesar Rp. 6.335.000,00 ke 2350.QHD.001.052.F. Pengadaan Seragam Awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 10.440.000,00;
- ✓ Dari 2350.QHD.003.052.A. Operasional Speed Boat 8 Meter sebesar Rp. 7.900.000 dan 2350.QHD.003.052.B. Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar) sebesar Rp. 5.872.000,00 ke 2350.QHD.003.052.C. Pengadaan Seragam Operator Speedboat Pengawas sebesar Rp. 13.772.000,00;
- ✓ Dari 2352.QIC.001.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 5.790.000,00 dan 2352.QIC.001.053.A Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha sebesar Rp. 5.500.000,00 ke 2352.QIC.001.052.A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 11.290.000,00;
- ✓ Dari 2353.QIC.001.052.B. Tindak lanjut hasil pengawasan pelaku usaha kapal perikanan sebesar Rp. 6.500.000 ke 2353.QIC.001.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha kapal perikanan sebesar Rp. 6.500.000,00;
- ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan komoditas tertentu (LKR) ke detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Satwas Seram Bagian Timur sebesar Rp. 3.340.000,00;

- ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 5.400.000,00 ke 2355.EBA.994.002.A Keperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp. 5.520.000,00, 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 111.000 dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 9.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBC.954.053.A.524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ke 2355.EBC.954.053.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 8.943.000,00.
- **Revisi DIPA ke 08** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 02 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 08 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.
Menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-958/MK.02/2022 perihal Realokasi Anggaran K/L TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pemenuhan Belanja Gaji (Cilacap dan Batam) dan permohonan untuk melakukan pemotongan/penghapusan langsung anggaran *Automatic Adjustment* sekaligus menyesuaikan dengan target volume output dan melakukan pergeseran anggaran antar satker, Stasiun PSDKP Ambon melakukan penghapusan langsung anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 3.105.038.000,00
 - **Revisi DIPA ke 09** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 12 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 09 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :
 - ✓ Dari 2350.QDD.001.051.A. Perencanaan Pembinaan POKMASWAS sebesar Rp. 240.000,00 dan 2350.QDD.001.052.A.522151 Belanja Jasa Profesi sebesar Rp. 1.500.000 ke 2350.QDD.001.052.A.522141 Belanja Sewa sebesar Rp. 1.740.000,00;

- ✓ Dari 2352.QIC.001.052.A. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi nasional ke 2352.QIC.001.053.A. Konsolidasi data dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi nasional sebesar Rp. 5.500.000,00;
 - ✓ Dari 2353.BIC.001.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan ke 2353.BIC.001.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp. 3.048.000,00;
 - ✓ Dari 2353.BIC.002.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan ke 2353.BIC.002.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp. 5.800.000,00;
 - ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Ambon ke 2353.QIC.003.052.A.524111 detail Perjalanan dalam rangka pengawasan pembudidayaan ikan Satwas Ternate sebesar Rp. 450.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBA.962.052.E. 521211 detail Pembuatan Banner ke 2355.EBA.962.052.E. 521211 detail Pembuatan Spanduk sebesar Rp. 1.570.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBA.994.001.A. 511129 Belanja Uang Makan PNS ke 2355.EBA.994.001.A. 512211 Belanja Uang Lembur sebesar Rp. 14.550.000,00;
 - ✓ Dari 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.947.000 ke 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 975.000,00 dan 2355.EBA.994.002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 972.000,00.
- **Revisi DIPA ke 10** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2022 Tanggal 23 Desember 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 1608-0853-7431-0206 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 17.969.066.000,00. Revisi ke 10 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp*

tidak mengalami perubahan. Adapun pergeseran anggaran antara lain :

- ✓ Dari 2350.QDD.001.051.A. Perencanaan Pembinaan POKMASWAS ke 2350.QDD.001.051.B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS sebesar Rp. 153.000,00;
- ✓ Dari 2351.AEA.002.052.A. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan ke 2351.AEA.002.053.A. Evaluasi Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.585.000,00;
- ✓ Dari 2352.BIC.001.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp. 385.000,00 dan 2352.BIC.001.052.A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi sebesar Rp. 2.374.000,00 ke 2352.BIC.001.053.A. Konsolidasi Data dan Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebesar Rp 2.759.000,00;
- ✓ Dari 2352.QIC.002.051.A. Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan sebesar Rp. 59.000,00 dan 2352.QIC.002.052.A. Jumlah unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebesar Rp. 4.050.000,00 ke 2352.QIC.002.053.A. Konsolidasi Data dan Pelaporan Pengawasan Unit Usaha Pengawasan Destructive Fishing sebesar Rp 4.109.000,00;
- ✓ Dari 2353.BIC.002.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan ke 2353.BIC.002.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pengolahan hasil perikanan lingkup UPT sebesar Rp 3.440.000,00;
- ✓ Dari 2353.QIC.003.052.A. Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan ke 2353.QIC.003.053.A. Monev pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan lingkup UPT sebesar Rp 4.000.000,00;

- ✓ Dari 2355.EBA.962.052.E. Publikasi dan Dokumentasi ke 2355.EBA.962.052.A. Perjalanan Dinas Dan Koordinasi Dan Monitoring sebesar Rp 1.168.000,00;
- ✓ Dari 2355.EBA.994.002.B. Biaya Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 492.000,00, 2355.EBA.994.002.C. Langganan Aplikasi sebesar Rp. 285.000,00, 2355.EBA.994.002.D. Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 675.000 ke 2355.EBA.994.002.A. KKeperluan Sehari-hari Perkantoran sebesar Rp 1.452.000,00;
- ✓ Dari 2355.EBB.951.053.A.532111 detail Meja Kursi (Satwas) sebesar Rp. 16.000,00 dan 2355.EBB.951.053.A.532111 detail Lemari Arsip sebesar Rp. 10.000,00 ke 2355.EBB.951.053.A.532111 detail AC sebesar Rp 26.000,00.

c. Belanja Dibayar Dimuka

Terdapat Saldo beban Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.333.333,00, dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Belanja sewa bangunan kantor Wilker Masohi senilai Rp5.500.000, masa kontrak terhitung mulai tanggal 30 Juni 2022 s.d 29 Juni 2023;
- ⇒ Belanja Sewa bangunan/rumah Gudang Barang Bukti Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp12.500.000,00 masa kontrak terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 s.d 19 Juni 2023;
- ⇒ Belanja sewa bangunan senilai Rp7.333.333,00 masa kontrak terhitung mulai tanggal 25 April 2022 s.d 24 April 2023.

d. Belanja BBM

Stasiun PSDKP Ambon memiliki 1 unit kapal pengawas Hiu 13. Berkaitan dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak Berita Acara Pemakaian Bahan Bakar :

No	Bulan	Nomor BA	Tanggal	Uraian
1	Januari	36/HIU.13/Sta .7/PW.431/I/2 022	31-Jan-2022	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 1.000 liter
				Jumlah Pengisian = 10.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 2.000 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 9.000 liter
2	Februari	136/HIU.13/St a.7/PW.431/II /2022	28-Feb-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 9.000 liter
				Jumlah Pengisian = 56.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 55.200 liter

				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 9.800 liter
3	Maret	211/HIU.13/St a.7/PW.431/III /2022	31-Mar-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 9.800 liter
				Jumlah Pengisian = 44.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 40.900 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 12.900 liter
4	April	309/HIU.13/St a.7/PW.431/IV /2022	30-Apr-2022	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 12.900 liter
				Jumlah Pengisian = 79.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 88.400 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 3.500 liter
5	Mei	342/HIU.13/St a.7/PW.431/V /2022	30-Mei-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 3.500 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 1.950 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 1.550 liter
6	Juni	363/Hiu13/St a.7/PW.431/VI /2022	30-Jun-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 1.550 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 770 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 780 liter
7	Juli	375/Hiu13/Sta .7/PW.431/VII /2022	31-Jul-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 780 liter
				Jumlah Pengisian = 5.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 1.830 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 3.950 liter
8	Agustus	415/Hiu13/Sta .7/PW.431/VIII /2022	31-Agt-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 3.950 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 850 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 3.100 liter
9	September	B.3790/PSDKP Sta.7/PW.380/ IX/2022	30-Sept-22	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 3.100 liter
				Jumlah Pengisian = 20.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 9.000 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 14.100 liter
10	Oktober	B.4147/PSDKP Sta.7/PW.380/ X/2022	31-Okt-2022	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 14.100 liter
				Jumlah Pengisian = 6.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 12.100 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 8.000 liter
11	November	B.4530/PSDKP Sta.7/PW.380/ XI/2022	30-Nov-2022	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 8.000 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter

				Jumlah Pemakaian = 50 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 7.950 liter
12	Desember	B.4874/PSDKP Sta.7/PW.380/XII/2022	31-Des-2022	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 7.950 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 1.000 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 6.950 liter

Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Mengalokasikan Anggaran Belanja BBM sebesar Rp4.514.097.000,00, yang sudah dilakukan pembayaran hingga termin 23 sebesar Rp4.514.097.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 100%.

e. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2022*

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	6.248.730.383	0
2	Peralatan dan Mesin	43.862.079.651	3.330.000
3	Gedung dan Bangunan	7.288.390.955	0
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	498.761.400	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Aset Tak Berwujud	0	0
TOTAL		57.414.443.945	3.330.000

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

*Daftar Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2022*

No	No SK	Tanggal SK	Aset yang di PSP	Nilai Aset (Rp)
1	218/KEMEMKP/SJ/P L.930/2019	15 Maret 2019	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	2.846.001.991
2	11/KM.6/WKN.17/KN L.01/2019	05 Maret 2019	Kendaraan	1.588.483.130
3	27/KM.6/WKN.17/KN L.01/2019	25 April 2019	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	130.412.000
4	20/KM.6/WKN.17/2019	09 Mei 2019	Speed Boat	6.614.803.767
5	195/KEMEMKP/SJ/P L.930/2019	13 Maret 2019	Bangunan Air	51.148.000
6	23/KM.6/WKN.17/KN L.01/2019	09 April 2019	Jalan Bangunan Air dan Jaringan di atas 100 jt	326.450.000

7	31/KM.6/WKN.17/KN L.01/2017	05 Juni 2017	Tanah	2.024.750.000
8	44/KM.6/WKN.17/KN L.01/2019	27 Juni 2019	Tanah	244.736.842
9	53/KM.6/WKN.17/KN L.01/2019	05 Agustus 2019	Gedung dan Bangunan	4.734.997.552
10	735/KEMENKP/SJ/P L.930/2019	30 Oktober 2019	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	122.805.500
11	31/KEPMENKP/SJ/P L.930/2020	30 Januari 2020	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	242.263.160
12	120/KM.6/WKN.17/K NL.01/2020	23 Juli 2020	Kapal Pengawas Perikanan	29.431.253.750
13	174/KEPMENKP/SJ/ PL.930/2022	12 April 2022	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	531.149.700
14	102/KM.6/WKN.17/K NL.01/2022	28 Juni 2022	Kendaraan	569.753.200
15	185/KM.6/WKN.17/K NL.01/2022	15 November 2021	Kendaraan	608.700.000
16	233/KEPMEN- KP/SJ/PL710/2022	19 April 2022	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	428.085.430
17	20/KM.6/KNL.1701/2 022	22 April 2022	Bangunn dan Gedung	3.905.701.955
18	915/KEPMEN- KP/SJ/PL.170/2022	21 November 2022	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	255.136.600

Aset yang belum ditetapkan status penggunaannya (PSP) adalah sebanyak 1 (satu) NUP senilai Rp3.330.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

*Daftar BMN Yang Belum Penetapan Status Penggunaan
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon
Per 31 Desember 2022*

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI
3.05.02.04.004	A.C.Split	1	3.330.000	
TOTAL			3.330.000	0

f. Penghapusan BMN

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp584.712.130,00.

*Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon
Per 31 Desember 2022*

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Barang Rusak Berat	584.712.130	0
TOTAL		584.712.130	0

Rincian transaksi Usulan Barang Rusak ke Pengelola Barang, antara lain:

- Transaksi Usulan Barang Rusak ke Pengelola Barang berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 27 (*Dua Puluh Tujuh*) unit peralatan dan mesin dengan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor 963.PSDKP.1/PL.750/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp102.958.500,00 yang terdiri :
 - 3 (*Tiga*) unit Alat Ukur Lainnya dengan nilai sebesar Rp1.740.000,00;
 - 1 (*Satu*) Unit Mesin Ketik Lainnya dengan nilai sebesar Rp1.450.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit mesin ketik dengan nilai sebesar Rp665.000,00;
 - 2 (*Dua*) unit AC Split dengan nilai sebesar Rp4.744.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit loudspeaker dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit camera digital dengan nilai sebesar Rp4.900.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit teropong dengan nilai sebesar Rp739.000,00;
 - 2 (*Dua*) unit infrar red dan ultraviolet dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit uninterrupted power suply (UPS) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,00;
 - 1 (*Satu*) unit meter dengan nilai sebesar Rp500.000,00;
 - 4 (*Empat*) unit P.C. Unit dengan nilai sebesar Rp38.565.000,00.
 - 2 (*Dua*) unit Lap top dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- Surat Persetujuan dari KPKNL Ambon Nomor S-107/MK.6/KNL.1701/2022 Tanggal 15 Desember 2022 terdiri dari 7 (*tujuh*) unit peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp486.409.130,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (*satu*) unit speedboat/Motor tempel dengan nilai sebesar Rp363.000.000,00;
 - 6 (*enam*) unit Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp123.409.130,00.

g. Koreksi atas Pencatatan Modul Aset Tetap

Koreksi atas pencatatan Modul aset di Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Pencatatan Perubahan Kuantitas (Luas Tanah)

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPKNL Ambon tanggal 05 Agustus 2022 pada aplikasi SIMAN Stasiun PSDKP Ambon ditemukan luasan tanah pada Sakti Modul Aset tetap tidak sama dengan luasan tanah pada sertifikat tanah, sehingga

di sarankan untuk melakukan koreksi pencatatan perubahan kuantitas dengan Surat Keterangan nomor B.3317/PSDKPSta.7/PL.710/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dimana perubahan tersebut dilakukan karena penginputan luas tanah pada saat kapitalisasi pengembangan langsung melalui KDP di Aplikasi SIMAK BMN Tahun 2018 yaitu sebesar 2.633 yang membuat aset tanah bertambah menjadi 5.266 m² yang seharusnya tidak terjadi penambahan luas tanya hanya penambahan nilai aset akibat pematangan lahan. Sehingga dikoreksi menjadi 2.633 m² melalui Koreksi Perubahan Kualitas Berkurang sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Ambon.

2. Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Bertambah

Berdasarkan laporan Hasil Audit Kinerja pada Stasiun PSDKP Ambon nomor :R.79/ITJ.2/HP.550/IV/2022 tanggal 14 April 2022 terkait pengadaan/pembelian perlengkapan kapal pengawas Hiu 13 tanggal 16 Juli 2021 berupa 2 (dua) unit A.C Split senilai Rp19.800.000,- tanpa biaya pemasangan dan pada tahun anggaran 2022 diketahui ada biaya pemasangan A.C Split tersebut dengan menggunakan akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) senilai Rp2.992.000,- yang seharusnya menggunakan akun 532117 (Belanja Modal pemasangan Peralatan dan Mesin). Telah dilakukan revisi RKAKL tanggal 14 Juli 2022 dan revisi SPM sehingga pada modul aset tetap dilakukan koreksi pencatatan melalui transaksi koreksi perubahan nilai bertambah terhadap A.C Split Nup 38 dan 39 sesuai dengan biaya pemasangan senilai Rp2.992.000,-

3. Koreksi Pencatatan Kesalahan Kode Barang

Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan perubahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap yaitu koreksi pencatatan kesalahan kode barang antara lain :

- o Pada tanggal 19 September 2022 dengan nomor Surat Keterangan nomor B.3641/PSDKPSta.7/PL.710/IX/2022 di reklas keluar dengan rincian barang :

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (RP)	KETERANGAN
1.	3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1	2013	5.500.000	Pembelian
2.	3080605036	Refrigerator/Freezer	1	2011	7.240.865	Pembelian
3.	3080605036	Refrigerator/Freezer	2	2020	4.125.000	Pembelian
4.	3150405001	Genset	1	2012	5.515.000	Pembelian
5.	3150405001	Genset	2	2016	14.700.000	Pembelian
6.	3150405001	Genset	3	2012	6.790.000	Pembelian

Di reklas masuk dengan rincian barang sebagai berikut:

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	1	2011	7.240.865	Reklasifikasi Barang
2.	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	2	2013	5.500.000	Reklasifikasi Barang
3.	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	3	2020	4.125.000	Reklasifikasi Barang
4.	3060347002	Genset	1	2012	5.515.000	Reklasifikasi Barang
5.	3060347002	Genset	2	2012	6.790.000	Reklasifikasi Barang
6.	3060347002	Genset	3	2016	14.700.000	Reklasifikasi Barang

Pada tanggal 29 September 2022 dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap nomor : B.3771/PSDKPSta.7/PL.710/IX/2022 direklas keluar dengan rincian barang :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	3040104004	Lemari Penyimpan	1	2010	534.000	Kesalahan Kodefikasi
2	3040104004	Lemari Penyimpan	2	2010	2.208.000	Kesalahan Kodefikasi
3	3040104004	Lemari Penyimpan	3	2010	2.208.000	Kesalahan Kodefikasi
4	3040104004	Lemari Penyimpan	4	2010	2.000.000	Kesalahan Kodefikasi
5	3040104004	Lemari Penyimpan	5	2013	1.760.000	Kesalahan Kodefikasi
6	3040104004	Lemari Penyimpan	6	2015	3.292.857	Kesalahan Kodefikasi
7	3040104004	Lemari Penyimpan	7	2015	3.292.857	Kesalahan Kodefikasi
8	3040104004	Lemari Penyimpan	8	2022	5.094.900	Kesalahan Kodefikasi
9	3040104004	Lemari Penyimpan	9	2022	5.094.900	Kesalahan Kodefikasi
10	3070101127	Kursi Dorong	1	2017	3.190.000	Kesalahan Kodefikasi
11	3070101127	Kursi Dorong	2	2017	2.200.000	Kesalahan Kodefikasi
12	3070101127	Kursi Dorong	3	2017	2.200.000	Kesalahan Kodefikasi
13	3070101127	Kursi Dorong	4	2017	2.200.000	Kesalahan Kodefikasi
14	3070101127	Kursi Dorong	5	2017	935.000	Kesalahan Kodefikasi
15	3070101127	Kursi Dorong	6	2017	935.000	Kesalahan Kodefikasi
16	3070101127	Kursi Dorong	7	2017	935.000	Kesalahan Kodefikasi
17	3070101127	Kursi Dorong	8	2017	935.000	Kesalahan Kodefikasi
18	3070101127	Kursi Dorong	9	2017	935.000	Kesalahan Kodefikasi
19	3070101127	Kursi Dorong	10	2010	850.000	Kesalahan Kodefikasi
20	3070101127	Kursi Dorong	11	2010	850.000	Kesalahan Kodefikasi
21	3070101127	Kursi Dorong	12	2010	850.000	Kesalahan Kodefikasi
22	3080113081	TV Monitor	1	2010	2.440.000	Kesalahan Kodefikasi
23	3080113081	TV Monitor	2	2010	2.440.000	Kesalahan Kodefikasi
24	3080113081	TV Monitor	3	2010	2.440.000	Kesalahan Kodefikasi
25	3080141101	Generator	1	2010	8.250.000	Kesalahan Kodefikasi

26	3080141142	Kompur Gas (Alat Laboratorium Pertanian)	1	2010	600.000	Kesalahan Kodefikasi
27	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	1	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
28	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	2	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
29	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	3	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
30	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	4	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
31	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	5	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
32	3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	6	2010	6.000.000	Kesalahan Kodefikasi
33	3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	2010	1.500.000	Kesalahan Kodefikasi
34	3080403003	Sirine (Proteksi Lingkungan)	1	2010	6.350.000	Kesalahan Kodefikasi
35	3090407022	Layar Proyektor	1	2017	3.951.750	Kesalahan Kodefikasi
36	3090407022	Layar Proyektor	2	2017	3.951.750	Kesalahan Kodefikasi
37	3090407022	Layar Proyektor	3	2017	3.951.750	Kesalahan Kodefikasi
38	3090409098	Stavol	1	2014	300.000	Kesalahan Kodefikasi
39	3090409098	Stavol	2	2014	300.000	Kesalahan Kodefikasi
40	3090409098	Stavol	3	2014	300.000	Kesalahan Kodefikasi
41	3020202003	Kursi Roda	1	2021	1.650.000	Kesalahan Kodefikasi

Dilakukan reklas masuk dengan rincian barang sebagai berikut :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	45	2010	534.000	Reklasifikasi Barang
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	46	2010	2.208.000	Reklasifikasi Barang
3	3050104001	Lemari Besi/Metal	47	2010	2.208.000	Reklasifikasi Barang
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	48	2010	2.000.000	Reklasifikasi Barang
5	3050104001	Lemari Besi/Metal	49	2013	1.760.000	Reklasifikasi Barang
6	3050104001	Lemari Besi/Metal	50	2015	3.292.857	Reklasifikasi Barang
7	3050104001	Lemari Besi/Metal	51	2015	3.292.857	Reklasifikasi Barang
8	3050104001	Lemari Kayu	19	2022	5.094.900	Reklasifikasi Barang
9	3050104001	Lemari Kayu	20	2022	5.094.900	Reklasifikasi Barang
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	140	2017	3.190.000	Reklasifikasi Barang
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	141	2017	2.200.000	Reklasifikasi Barang
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	142	2017	2.200.000	Reklasifikasi Barang
13	3050201003	Kursi Besi/Metal	143	2017	2.200.000	Reklasifikasi Barang
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	144	2017	935.000	Reklasifikasi Barang

15	3050201003	Kursi Besi/Metal	145	2017	935.000	Reklasifikasi Barang
16	3050201003	Kursi Besi/Metal	146	2017	935.000	Reklasifikasi Barang
17	3050201003	Kursi Besi/Metal	147	2017	935.000	Reklasifikasi Barang
18	3050201003	Kursi Besi/Metal	148	2017	935.000	Reklasifikasi Barang
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	149	2010	850.000	Reklasifikasi Barang
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	150	2010	850.000	Reklasifikasi Barang
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	151	2010	850.000	Reklasifikasi Barang
22	3050206002	Televisi	12	2010	2.440.000	Reklasifikasi Barang
23	3050206002	Televisi	13	2010	2.440.000	Reklasifikasi Barang
24	3050206002	Televisi	14	2010	2.440.000	Reklasifikasi Barang
26	3060347002	Genset	4	2010	8.250.000	Reklasifikasi Barang
27	3050205002	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	2010	600.000	Reklasifikasi Barang
28	3050204004	A.C. Split	48	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
29	3050204004	A.C. Split	49	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
30	3050204004	A.C. Split	50	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
31	3050204004	A.C. Split	51	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
32	3050204004	A.C. Split	52	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
33	3050204004	A.C. Split	53	2010	6.000.000	Reklasifikasi Barang
34	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	2010	1.500.000	Reklasifikasi Barang
35	3050105088	Sirine	1	2010	6.350.000	Reklasifikasi Barang
38	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2017	3.951.750	Reklasifikasi Barang
39	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2017	3.951.750	Reklasifikasi Barang
40	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	2017	3.951.750	Reklasifikasi Barang
41	3050206019	Stabilisator	2	2014	300.000	Reklasifikasi Barang
42	3050206019	Stabilisator	3	2014	300.000	Reklasifikasi Barang
43	3050206019	Stabilisator	4	2014	300.000	Reklasifikasi Barang
47	3070101127	Kursi Dorong	13	2021	1.650.000	Reklasifikasi Barang

h. Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Stasiun PSDKP Ambon mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp30.183.000,00. Anggaran tersebut terserap 99,11% yakni sebesar Rp29.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (Masker)	18,075,000	18,075,000	100.00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Pemeriksaan Rapid Tes/Swab)	12,108,000	11,840,000	97.79
Jumlah		30,183,000	29,915,000	99.11

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP AMBON 215141

Waktu Olap: 2023-01-19 16:04:45.0 [B@7943f325
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 20/01/23 12:44 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	17,969,066,000	17,929,273,964	(39,792,036)	100	20,764,650,000	20,621,820,818	142,829,182	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BA(032) ES1(05) MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/01/23 12:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
Tgl Data : 19/1/23 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,995,768,000	2,122,584,000	2,122,583,580	0	2,122,583,580	100	420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	36,000	35,816	662	35,154	99.49	846
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	142,800,000	154,303,000	154,301,498	0	154,301,498	100	1,502
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	41,930,000	46,174,000	46,173,594	0	46,173,594	100	406
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	44,100,000	42,350,000	42,340,000	0	42,340,000	99.98	10,000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	128,390,000	140,785,000	140,784,480	0	140,784,480	100	520
511129	Belanja Uang Makan PNS	240,000,000	275,613,000	274,658,000	0	274,658,000	99.65	955,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	79,380,000	92,405,000	92,405,000	0	92,405,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,690,050,000	2,888,470,000	2,887,501,968	662	2,887,501,306	99.97	968,694
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	61,218,000	64,857,000	57,030,000	0	57,030,000	87.93	7,827,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	61,218,000	64,857,000	57,030,000	0	57,030,000	87.93	7,827,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,228,128,000	2,526,223,000	2,525,120,583	0	2,525,120,583	99.96	1,102,417
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,228,128,000	2,526,223,000	2,525,120,583	0	2,525,120,583	99.96	1,102,417
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,979,396,000	5,479,550,000	5,469,652,551	662	5,469,651,889	99.82	9,898,111
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,316,572,000	1,409,780,000	1,406,975,742	0	1,406,975,742	99.8	2,804,258
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114,685,000	99,992,000	99,764,215	0	99,764,215	99.77	227,785
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,200,000	14,160,000	14,029,200	0	14,029,200	99.08	130,800
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	156,360,000	145,170,000	145,170,000	0	145,170,000	100	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	18,075,000	18,075,000	0	18,075,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,618,817,000	1,687,177,000	1,684,014,157	0	1,684,014,157	99.81	3,162,843
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,920,258,000	5,357,958,000	5,353,212,892	0	5,353,212,892	99.91	4,745,108
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,900,000	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	730,819,000	617,125,000	615,893,296	0	615,893,296	99.8	1,231,704
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,685,977,000	5,984,633,000	5,978,656,188	0	5,978,656,188	99.9	5,976,812
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	168,400,000	142,340,000	142,250,420	0	142,250,420	99.94	89,580

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BA(032) ES1(05) MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/01/23 12:45 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
Tgl Data : 19/1/23 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	168,400,000	142,340,000	142,250,420	0	142,250,420	99.94	89,580
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	133,200,000	134,935,000	134,780,049	0	134,780,049	99.89	154,951
522112	Belanja Langganan Telepon	114,000,000	99,720,000	99,552,248	0	99,552,248	99.83	167,752
522113	Belanja Langganan Air	57,600,000	38,193,000	38,158,500	0	38,158,500	99.91	34,500
522141	Belanja Sewa	141,294,000	79,301,000	79,300,000	0	79,300,000	100	1,000
522151	Belanja Jasa Profesi	40,700,000	25,700,000	25,700,000	0	25,700,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	159,668,000	100,832,000	100,099,511	0	100,099,511	99.27	732,489
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	48,006,000	12,108,000	11,840,000	0	11,840,000	97.79	268,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	694,468,000	490,789,000	489,430,308	0	489,430,308	99.72	1,358,692
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233,285,000	194,422,000	194,265,457	0	194,265,457	99.92	156,543
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,175,033,000	913,810,000	907,767,562	0	907,767,562	99.34	6,042,438
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	944,500,000	949,643,000	949,642,988	0	949,642,988	100	12
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,352,818,000	2,057,875,000	2,051,676,007	0	2,051,676,007	99.7	6,198,993
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,978,763,000	1,074,304,000	1,066,295,899	0	1,066,295,899	99.25	8,008,101
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	222,300,000	111,450,000	106,950,000	0	106,950,000	95.96	4,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	463,900,000	308,652,000	308,090,652	0	308,090,652	99.82	561,348
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,694,963,000	1,509,406,000	1,496,336,551	0	1,496,336,551	99.13	13,069,449
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,215,443,000	11,872,220,000	11,842,363,631	0	11,842,363,631	99.75	29,856,369
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	894,700,000	258,504,000	258,466,600	0	258,466,600	99.99	37,400
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000	100	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	450,000,000	355,800,000	355,799,844	0	355,799,844	100	156
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,344,700,000	617,296,000	617,258,444	0	617,258,444	99.99	37,556
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,344,700,000	617,296,000	617,258,444	0	617,258,444	99.99	37,556
	JUMLAH BELANJA	20,539,539,000	17,969,066,000	17,929,274,626	662	17,929,273,964	99.78	39,792,036

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data 19/01/23 3:57 PM
Tgl. Cetak 20/01/2023 12:44 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	25,333,333	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	44,212,240	0
0.0	117114	Suku Cadang	347,314,328	0
0.0	131111	Tanah	6,248,730,383	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	43,865,409,651	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,288,390,955	0
0.0	134112	Irigasi	377,598,000	0
0.0	134113	Jaringan	121,163,400	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	239,903,713	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	29,947,883,558
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	485,472,659
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	45,286,637
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	16,317,433
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	85,120,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	85,120,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	14,304,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	11,424,553
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,929,273,964
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,456,855	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	93,217,800
0.0	391111	Ekuitas	0	30,473,742,327
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,102,961
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,720,620
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	459,869
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3,276,366
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,122,583,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,154	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	154,301,498	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	46,173,594	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,220,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	42,340,000	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	140,784,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	288,962,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	92,405,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	57,030,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,525,120,583	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,406,975,742	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	99,764,215	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data 19/01/23 3:57 PM
Tgl. Cetak 20/01/2023 12:44 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,029,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	145,170,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,075,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,353,212,892	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,550,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	615,893,296	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	135,829,921	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	97,085,248	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	40,085,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	115,425,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	100,099,511	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,840,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,265,457	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	910,759,562	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,066,295,899	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,950,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	308,090,652	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,106,232,386	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	153,436,917	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	8,233,934	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,304,956	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	131,195,080	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	768,371,960	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	16,141,672	0
JUMLAH			79,115,602,747	79,115,602,747

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data 19/01/23 4:07 PM

Tgl. Cetak 20/01/2023 12:44 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,929,273,964
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,456,855	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,720,620
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	459,869
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3,276,366
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,122,583,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,816	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	662
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,301,498	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	46,173,594	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	42,340,000	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	140,784,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	274,658,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	92,405,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	57,030,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,525,120,583	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,406,975,742	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	99,764,215	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,029,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	145,170,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,075,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,353,212,892	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,550,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	615,893,296	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	142,250,420	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	134,780,049	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	99,552,248	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	38,158,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	79,300,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	25,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	100,099,511	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,840,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,265,457	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	907,767,562	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	949,642,988	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,066,295,899	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,950,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 215141

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data 19/01/23 4:07 PM

Tgl. Cetak 20/01/2023 12:44 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	308,090,652	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258,466,600	0
3.0	532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	2,992,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	355,799,844	0
JUMLAH			17,940,731,481	17,940,731,481

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN** Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI : 032052100KD **BA(032) ES1(05) MALUKU** Tanggal : 20/01/23 12:43 AM
SATUAN KERJA : 215141 **STASIUN PSDKP AMBON** Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : KD Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 19/01/23 4:10 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,996,986	1,535,000	9,461,986	616.416
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,996,986	1,535,000	9,461,986	616.416
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,996,986	1,535,000	9,461,986	616.416
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,483,955,889	4,584,586,989	899,368,900	19.617
Beban Persediaan	131,195,080	149,437,100	(18,242,020)	(12.207)
Beban Barang dan Jasa	8,188,735,525	6,756,771,134	1,431,964,391	21.193
Beban Pemeliharaan	1,873,396,979	1,434,819,295	438,577,684	30.567
Beban Perjalanan Dinas	1,496,336,551	1,413,988,453	82,348,098	5.824
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 032052100KD
SATUAN KERJA : 215141
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
BA(032) ES1(05) MALUKU
STASIUN PSDKP AMBON

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 20/01/23 12:43 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 19/01/23 4:10 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,271,208,193	3,939,982,960	(668,774,767)	(16.974)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	20,444,828,217	18,279,585,931	2,165,242,286	11.845
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20,433,831,231)	(18,278,050,931)	(2,155,780,300)	11.794
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(16,141,672)	(1,611,233,226)	1,595,091,554	(98.998)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	20,486,600	(20,486,600)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	16,141,672	1,631,719,826	(1,615,578,154)	(99.011)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	459,869	8,932,084	(8,472,215)	(94.851)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	459,869	8,932,084	(8,472,215)	(94.851)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(15,681,803)	(1,602,301,142)	1,586,619,339	(99.021)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20,449,513,034)	(19,880,352,073)	(569,160,961)	2.863
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(20,449,513,034)	(19,880,352,073)	(569,160,961)	2.863

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2100 **MALUKU**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 215141 **STASIUN PSDKP AMBON**

Tgl Data : 19/01/23 4:10 PM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 20/01/23 12:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,473,742,327	29,869,932,568	603,809,759	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20,449,513,034)	(19,880,352,073)	(569,160,961)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,102,961	0	2,102,961	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,102,961	0	2,102,961	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,011,034,909	20,484,161,832	(2,473,126,923)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,436,375,164)	603,809,759	(3,040,184,923)	-
EKUITAS AKHIR	28,037,367,163	30,473,742,327	(2,436,375,164)	-